

**DIREKTORAT**

Pembinaan Kursus dan Pelatihan

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**TAHUN 2018**



023.05.0100.666870 KANTOR PUSAT  
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Tentang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan .....	1
1. Landasan Filosofis.....	1
2. Tantangan dan Potensi .....	5
B. Dasar Hukum .....	10
C. Tugas dan Fungsi .....	11
D. Isu Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan .....	18
BAB II . PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN ....	23
A. Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan .....	23
B. Target Capaian dan Indikator .....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.....	29
1. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja	34
2. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan/ berwirausaha.....	41
3. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Rujukan.....	49
4. Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan.....	52
5. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan/Mitra Yang Memperoleh Bantuan Penguatan Kelembagaan.....	62
6. Jumlah Jenis Kompetensi Lulusan Terstandarisasi .....	80
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh Bantuan Pembinaan.....	81
8. Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi.....	84

9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis .....	86
10. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Divalidasi .....	89
11. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Siap Diakreditasi) .....	91
12. Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi .....	91
13. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Magang Pada Dunia Usaha dan Dunia Industri.....	94
14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.....	97
15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN .....	99
B. Realisasi Anggaran.....	103
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	108
BAB IV. PENUTUP .....	110
A. Kesimpulan .....	110
B. Rekomendasi .....	111

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2018, target yang harus dicapai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam Rencana Strategis sebanyak 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tiga belas indikator tersebut meliputi:

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja sebanyak 50.000 orang;
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha sebanyak 90.000 orang;
3. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan sebanyak 20 lembaga;
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan sebanyak 40 naskah;
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan sebanyak 900 lembaga;
6. Jumlah Jenis kompetensi lulusan terstandarisasi sebanyak 5 jenis;
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan sebanyak 438 lembaga;
8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi sebanyak 140.000 orang;
9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 1.022 lembaga;
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi sebanyak 5.298 lembaga;
11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap diakreditasi) 3.500 lembaga;
12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi sebanyak 1.946 orang;
13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI) sebanyak 40.000 orang;

Berbagai kegiatan telah diprogramkan pada tahun ini untuk mendukung pencapaian target rencana strategis yang telah ditetapkan. Program layanan kursus dan pelatihan berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diselenggarakan dalam 2 program, yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sebanyak 50.000 orang dan Pendidikan Kecakapan

Wirausaha (PKW) sebanyak 90.000 orang baik di tingkat pusat dan provinsi. Program ini diberikan kepada masyarakat putus sekolah, menganggur, usia produktif, dan keluarga tidak mampu.

Selain itu, berbagai bentuk bantuan lain yang diberikan antara lain: Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan diberikan kepada 100 LKP dan SKB, pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) serta pembentukan dan pembinaan terhadap tempat Uji Kompetensi sebanyak 105 lembaga, bantuan untuk organisasi mitra/asosiasi profesi sebanyak 25 Lembaga, bantuan penyelenggaraan uji kompetensi bagi 15.000 peserta didik, dan bantuan untuk permagangan peserta didik kursus dan pelatihan sebanyak 1.000 peserta didik.

Berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran program perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan tata kelola pembinaan kursus dan pelatihan diantaranya meliputi perencanaan program, koordinasi dan sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, penilaian proposal, orientasi teknis bagi para penerima dana bantuan, penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Kurikulum Berbasis KKNI, penyusunan standar sarana dan prasarana, penyusunan standar sertifikasi instruktur kursus dan pelatihan, bahan ajar dalam bentuk media cetak maupun audio-visual, peningkatan mutu manajemen LKP, peningkatan mutu peserta didik berprestasi tingkat nasional, peningkatan mutu LKP berprestasi tingkat nasional, penyusunan bahan-bahan publikasi, penguatan uji kompetensi, fasilitasi Gerakan Indonesia Kompeten, fasilitasi promosi dan layanan kursus dan pelatihan, verifikasi dan validasi data LKP terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), pendayagunaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), validasi dan pengembangan model kursus dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan direktorat.

Hingga akhir Desember 2018, hasil yang telah dicapai berdasarkan IKK yang ditetapkan secara fisik antara lain;

1. IKK [1] Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja telah terealisasi sebanyak 65.040 orang peserta didik (130,08%) dari 50.000 orang yang

ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebanyak 65.000 peserta didik, terealisasi sebesar 100,06%;

2. IKK [2] Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha telah terealisasi sebanyak 47.365 orang peserta (52,63%) dari 90.000 orang peserta yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebanyak 47.000 peserta didik, terealisasi sebesar 100,78%;
3. IKK [3] Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan hingga akhir Desember 2018 telah terealisasi sebanyak 168 lembaga (840%) dari 20 lembaga yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan yaitu sebanyak 100 lembaga, terealisasi sebesar 168%. IKK ini awalnya adalah Jumlah kabupaten kota yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan rujukan dimana diperuntukkan untuk membuat *centre of excellent* atau pusat kursus dan pelatihan rujukan yang ada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan hasil analisis potensi vokasi yang dominan untuk dikembangkan. Seiring dengan perubahan arah kebijakan dan anggaran di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka desain dari IKK ini diubah menjadi bantuan sarana praktik kursus kepada LKP dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi dan menyesuaikan dengan tuntutan DUDI.
4. IKK [4] Jumlah standar program kursus dan pelatihan telah terealisasi 79 naskah (197,50%) standar kurikulum berbasis kompetensi, dari 40 naskah yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 69 naskah, terealisasi sebesar 114,49%;
5. IKK [5] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan terealisasi sebanyak 380 lembaga (42,22%) dari 900 lembaga yang ditargetkan di dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 780 lembaga, terealisasi sebesar 48,72%;
6. IKK [6] Jumlah Jenis Kompetensi Lulusan Terstandarisasi pada tahun 2018 berdasarkan target renstra ditetapkan sebanyak 5 jenis, akan tetapi tidak ditetapkan anggarannya disebabkan IKK ini merupakan tugas dan fungsi lembaga lain (Kemenaker), sehingga ini tidak ditetapkan di dalam renstra Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berdasarkan nomenklatur 2018;

7. IKK [7] Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan terealisasi sebanyak 390 lembaga (89,04%) dari 438 lembaga yang ditargetkan di dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 105 lembaga, terealisasi sebesar 371,43%;
8. IKK [8] Jumlah peserta didik memperoleh bantuan Uji Kompetensi terealisasi sebanyak 90.326 orang (64,52%) dari 140.000 orang yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 15.000 orang, terealisasi sebesar 602,17%;
9. IKK [9] Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis telah terealisasi sebanyak 382 lembaga (37,38%) dari 1.022 orang peserta didik yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 220 lembaga, terealisasi sebesar 173,64%;
10. IKK [10] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi terealisasi sebanyak 4.026 lembaga (75,99%) dari 5.298 lembaga yang ditargetkan dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 2.280 lembaga, terealisasi sebesar 176,58%;
11. IKK [11] Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap di akreditasi), IKK ini sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi menjadi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PP-PAUD dan DIKMAS serta BP-PAUD dan DIKMAS.
12. IKK [12] Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi terealisasi sebanyak 124 orang (6,37%) dari 1.946 orang yang ditargetkan di dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 100 orang, terealisasi sebesar 124%;
13. IKK [13] Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terealisasi sebesar 1000 orang (2,50%) dari 40.000 orang yang ditargetkan di dalam renstra, namun jika berdasarkan target output dalam RKAKL yang ditetapkan sebanyak 1000 orang, terealisasi sebesar 100%.

Dari target renstra yang sudah ditetapkan untuk tahun 2018, terdapat 3 (tiga) IKK yang melebihi target (IKK [1], [3], dan IKK[4]), 1 (satu) IKK memenuhi target (IKK [13]) dan 6 (Enam) IKK lainnya yang belum mencapai target maksimal dengan berbagai kendala

diantaranya dukungan anggaran yang masih sangat kurang dan 2 (dua) IKK ([6] dan [11]) yang tidak dilaksanakan karena sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi sudah menjadi tugas pokok dan fungsi UPT PP-PAUD dan DIKMAS serta BP-PAUD dan DIKMAS, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Sedangkan jika ditinjau dari target yang tertuang dalam output RKAKL terdapat 7 (tujuh) IKK yang melebihi target yaitu (IKK [1], IKK [2], IKK [3], IKK [4], IKK [8], IKK [9], dan IKK [12]), 1 (satu) IKK memenuhi target (IKK [13]), dan 3 (tiga) IKK yang belum memenuhi target maksimal (IKK [5], IKK [7], dan IKK [10])

Sedangkan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan antara lain perencanaan program, koordinasi dan sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, penilaian proposal, orientasi teknis bagi para penerima dana bantuan, peningkatan mutu manajemen LKP, penyusunan profil lembaga, peningkatan mutu LKP berprestasi tingkat nasional, penyusunan bahan-bahan publikasi, penguatan uji kompetensi, fasilitasi Gerakan Indonesia Kompeten, fasilitasi promosi dan layanan kursus dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan direktorat.



# KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2018 dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara wajib menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2018. Capaian kinerja yang disajikan berupa capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ada di empat layanan kegiatan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis.

Dari target renstra yang sudah ditetapkan untuk tahun 2018, terdapat 3 (tiga) IKK yang melebihi target (IKK [1], [3], dan IKK[4]), 1 (satu) IKK memenuhi target (IKK [13]) dan 7 (Tujuh) IKK lainnya yang belum mencapai target maksimal dengan berbagai kendala diantaranya dukungan anggaran yang masih sangat kurang dan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan efisiensi dan *selfblocking* anggaran, dan 2 (dua) IKK yang sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sedangkan jika ditinjau dari target yang tertuang dalam output RKAKL terdapat 7 (tujuh) IKK yang melebihi target yaitu (IKK [1], IKK [2], IKK [3], IKK [4], IKK [8]. IKK [9], dan IKK [12]), 1 (satu) IKK memenuhi target (IKK [13]), dan 3 (tiga) IKK yang belum memenuhi target maksimal (IKK [5], IKK [7], dan IKK [10])

Selain pencapaian tersebut diatas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyadari masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan serta memerlukan kerja keras dari semua sub direktorat di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memberikan kontribusi dalam penyiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan regional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan internasional, serta adanya perubahan ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri akibat revolusi industry 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini

merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif

Oleh karena itu, melalui laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2015-2019 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif pencapaian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan selama tahun anggaran 2018 sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk memahami permasalahan maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di setiap subdirektorat di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelaksanaan Renstra 2015-2019.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2018 ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2019

Plt. Direktur Pembinaan Kursus dan  
Pelatihan,



Dr. Wartanto

NIP. 196310091989031001

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 - 2035.....	5
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Indonesia di Indonesia.....	7
Tabel 3. Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka.....	8
Tabel 4. Jumlah LKP Menurut Provinsi .....	9
Tabel 5. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Per Subdit .....	17
Tabel 6. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berdasarkan jenis kelamin.....	18
Tabel 7. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2017 – 2018	31
Tabel 9. Jumlah Realisasi Program PKK Tahun 2018 .....	37
Tabel 10. Capaian IKK 1 Tahun 2017- 2018 .....	38
Tabel 11. Jumlah Realisasi Program PKW Tahun 2018.....	45
Tabel 12. Capaian IKK 2 Tahun 2017 - 2018 .....	46
Tabel 13. Capaian IKK 3 Tahun 2016-2017 .....	50
Tabel 14. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Per Provinsi .....	50
Tabel 15. Capaian IKK 4 Tahun 2017 - 2018 .....	53
Tabel 16. Daftar Kurikulum Berbasis Kompetensi yang Direviu Tahun 2018 .....	55
Tabel 17. Daftar Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan .....	59
Tabel 18. Bahan Ajar Audio Visual yang disusun Tahun 2018 .....	61
Tabel 19. Bahan Ajar Cetak Yang dicetak Tahun 2018 .....	61
Tabel 20. Capaian IKK 5 Tahun 2017 – 2018.....	62
Tabel 21. LSK Berpredikat Terbaik Tahun 2018.....	63
Tabel 22. Pemenang Lomba LKP Berprestasi Tahun 2018.....	67
Tabel 23. Pemenang Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018	70
Tabel 24. Judul Model Yang Divalidasi di Tahun 2018.....	75
Tabel 25. Capaian IKK 7 Tahun 2017 – 2018.....	82
Tabel 26. Capaian IKK 8 Tahun 2017 – 2018.....	85

Tabel 27. Capaian IKK 9 Tahun 2017 – 2018.....	86
Tabel 28. Capaian IKK 10 Tahun 2017 – 2018.....	90
Tabel 29. Capaian IKK 12 Tahun 2017 – 2018.....	92
Tabel 30. Capaian IKK 13 Tahun 2017 – 2018.....	95
Tabel 31. Capaian IKK 14 Tahun 2017 – 2018.....	97
Tabel 32. Pembagian Alokasi Anggaran Dit.Binsuslat Tahun 2018.....	104
Tabel 33. Pembagian Alokasi Anggaran Per Akun Belanja 2018 .....	104
Tabel 34. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja .....	105
Tabel 35. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan IKK Output.....	105

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arus Siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tahun 2015/2016.....	7
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan .....	17
Gambar 3. Pembelajaran Program PKK Jenis Keterampilan Baby Sitter .....	34
Gambar 4. Pembelajaran Program PKK Jenis Keterampilan Bidang Spa .....	36
Gambar 5. Pembelajaran Program PKW Bidang Teknisi Kendaraan Bermotor Roda 2.....	42
Gambar 6. Bantuan Sarana Praktik Kursus Bidang Menjahit Garmen.....	51
Gambar 7. Review Standar Kompetensi Lulusan Melibatkan Pakar Praktisi dan Akademisi Terkait .....	54
Gambar 8. Review Standar Sarana dan Prasarana Bersama Praktisi Terkait .....	58
Gambar 9. Lomba LKP Berprestasi Nasional Tahun 2018.....	66
Gambar 10. Lomba Kompetensi Peserta Didik Bidang Tata Rias Pengantin .....	69
Gambar 11. Validasi Model Kursus dan Pelatihan Tahun 2018.....	80
Gambar 12. Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Baby Sitter .....	83
Gambar 13. Presentase Alokasi Anggaran Dit.Binsuslat .....	103
Gambar 14. Alokasi Anggaran Dit.Binsuslat Tahun 2018 Per Akun Belanja .....	104



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Realisasi Program PKK/PKH 2014 – 2018.....	39
Grafik 2. Jumlah Realisasi Program PKM/PKW 2014 – 2018 .....	46
Grafik 3. Jumlah TUK Yang Memperoleh Bantuan Pembinaan .....	82
Grafik 4. Jumlah Peserta Uji Kompetensi i2015 – 2018.....	85
Grafik 5. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Divalidasi Tahun 2015 – 2018 .....	90
Grafik 6. Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti UJK Tahun 2015 – 2018.....	93
Grafik 7. Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Magang pada DUDI 2015 – 2018 .....	96



## DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Perjanjian Kinerja Kasubdit Program dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kasubdit Sarana dan Prasarana

Perjanjian Kinerja Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan

## A. Gambaran Umum Tentang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

### 1. Landasan Filosofis

Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah secara kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui sebuah pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 236 juta (Sensus Penduduk 2010), jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengarahkan Indonesia pada terjadinya “bonus demografi” dimana jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk dengan usia nonproduktif. Untuk itu perlu sebuah upaya pengendalian kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) seiring dengan laju pertumbuhan penduduk untuk terciptanya keseimbangan .

Pada hakikatnya kebutuhan untuk mengembangkan potensi, merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya seiring dengan perkembangan zaman. Pendidikan menjadi upaya yang ditempuh setiap orang dalam proses menuju ke arah penghidupan yang lebih baik. Kondisi ini selaras dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*).

Sejalan dengan hal tersebut negara harus mampu menjamin hak setiap warga negaranya untuk dapat memperoleh pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, pasal 28 ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945, Pembangunan Pendidikan Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat



saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya, ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa “pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan memerlukan layanan pendidikan, sehingga berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan terwujudnya masyarakat belajar. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal dituntut untuk mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan.

Pada Pasal 26 ayat (2) diungkapkan bahwa “Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”. Artinya, arah pendidikan nonformal tidak dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan akademis peserta didik, melainkan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat fungsional dalam kehidupan peserta didik dan membentuk pribadi-pribadi profesional, sehingga menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan atau memulai dan menjalankan usaha mandiri.

Pada Pasal 26 ayat (3) diungkapkan bahwa “Pendidikan Nonformal meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”. Ayat ini menggambarkan luasnya ruang lingkup pendidikan nonformal. Begitu banyaknya aspek kehidupan yang disentuh oleh lingkup pendidikan nonformal, memungkinkan terwujudnya sebuah masyarakat madani yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman yang dinamis, jika dikelola dengan sistem manajerial yang baik.

Terkait dengan jenis kelembagaan, di dalam Pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa “Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan,

Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Majelis Taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”. Sementara terkait dengan sasaran Pendidikan Nonformal diatur pada Pasal 26 ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi”. Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang berbasis masyarakat. Artinya, Lembaga Kursus dan Pelatihan diselenggarakan dan dikembangkan dengan pembiayaan atas dasar kontribusi dari peserta didik dan peran serta masyarakat dalam pendidikan serta *revenue generating activity* (kegiatan menambah pendapatan) yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial (*social responsibility*) lembaga kursus dan pelatihan dalam membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan fungsional serta profesionalitas sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pemerintah dalam hal ini perlu menjalankan peran dalam pembiayaan berupa pemberian subsidi baik dalam bentuk beasiswa bagi peserta didik, pengembangan kelembagaan, maupun pengembangan program-program kursus dan kelembagaan. Di samping itu peran pemerintah juga dalam bentuk penetapan regulasi dan melakukan pembinaan kepada para pengelola kursus dan pelatihan, sehingga dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

Perkembangan zaman yang dinamis, ditandai dengan adanya perubahan pada setiap lini kehidupan, pertumbuhan perekonomian berjalan seiring sejalan dengan perkembangan teknologi yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Lembaga kursus dan pelatihan, menjadi media efektif yang dapat “menjembatani” antara kondisi social masyarakat terkait kualitas SDM dengan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Artinya, sebuah lembaga kursus dan pelatihan, juga harus bergerak dinamis seiring perkembangan zaman dalam membekali setiap individu agar dapat memiliki kompetensi yang dinilai layak untuk dapat bekerja dan memiliki penghasilan.

Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah memberikan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian atau untuk tujuan lainnya. Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan pendidikan nonformal

dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti (*substitute*), pelengkap (*complement*), dan/atau penambah (*supplement*), dari pendidikan formal. Secara formal manusia memang harus menyelesaikan proses belajar yang diselenggarakan di sekolah formal atau perguruan tinggi. Namun, karena perkembangan dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang cepat maka lembaga kursus dan pelatihan dituntut untuk mampu mengantisipasi hal tersebut.

Pengembangan kursus dan pelatihan pada intinya diorientasikan pada pengembangan *life skills* (kecakapan hidup) dalam makna yang luas. Secara umum, kecakapan hidup diarahkan pada dimensi pengembangan keterampilan vokasional atau keterampilan kerja/pertukangan. Namun, dimensi kecakapan hidup lain juga perlu dilakukan untuk kebaikan tatanan hidup dan kehidupan. Dalam pengembangan keterampilan vokasional mestinya menyiratkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan ketrampilan vokasi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui kursus dan pelatihan secara fungsional menjawab kebutuhan akan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan serta kegiatan kursus bertujuan untuk melahirkan lulusan yang kompeten. Kompetensi merujuk pada sebuah kemampuan melaksanakan suatu tugas di dalam dunia pekerjaan dan/atau industri secara baik dan benar. Pencapaian kompetensi dalam sebuah bidang pekerjaan dan keterampilan menjadi landasan utama dalam filosofi penyelenggaraan proses pembelajaran melalui kursus dan pelatihan. Kerjasama dan penyelarasan (*fine tuning*) antara kompetensi yang dimiliki seseorang dengan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri menjadi perhatian utama dalam merumuskan strategi pembelajaran dan pelatihan. Dengan demikian akan dapat memberikan dan manfaat khususnya bagi pertumbuhan dunia usaha dan industri serta proses pengembangan masyarakat pada umumnya.

Pengembangan secara personal pada setiap warga masyarakat akan ditempatkan pada upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian pengembangan kursus dan pelatihan perlu memperhatikan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan kemandirian masyarakat. Upaya tersebut didorong dengan penyiapan dan pengembangan para pelaku wirausaha yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi dari potensi lokal yang dimiliki. Dengan demikian,

kegiatan kursus dan pelatihan dapat mendorong pengembangan motivasi dan kegiatan kewirausahaan di masyarakat.

## 2. Tantangan dan Potensi

### a. Tantangan

#### 1) Jumlah penduduk

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat pesat menjadi 238.518.800 jiwa. Jumlah penduduk ini akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut diproyeksikan sampai tahun 2035 adalah 305.652.400, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk di Indonesia 2010-2035 (dalam ribuan)

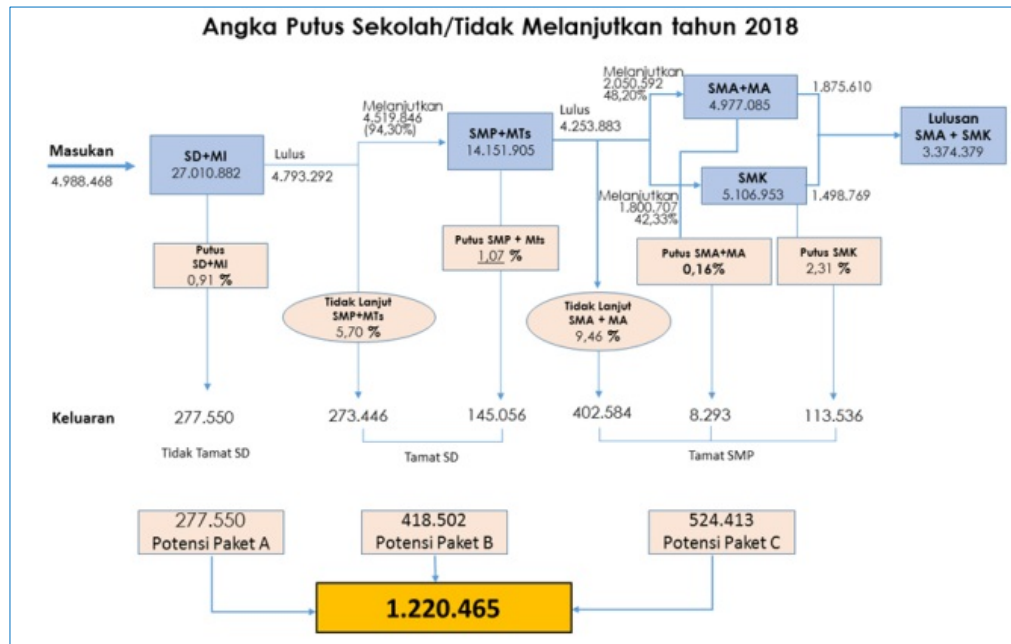
Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	4523.10	5002.00	5459.90	5870.00	6227.60	6541.40
Sumatera Utara	13028.70	13937.80	14703.50	15311.20	15763.70	16073.40
Sumatera Barat	4865.30	5196.30	5498.80	5757.80	5968.30	6130.40
Riau	5574.90	6344.40	7128.30	7898.50	8643.30	9363.00
Jambi	3107.60	3402.10	3677.90	3926.60	4142.30	4322.90
Sumatera Selatan	7481.60	8052.30	8567.90	9000.40	9345.20	9610.70
Bengkulu	1722.10	1874.90	2019.80	2150.50	2264.30	2360.60
Lampung	7634.00	8117.30	8521.20	8824.60	9026.20	9136.10
Kep. Bangka Belitung	1230.20	1372.80	1517.60	1657.50	1788.90	1911.00
Kepulauan Riau	1692.80	1973.00	2242.20	2501.50	2768.50	3050.50
<b>Pulau Sumatera</b>	<b>50860.30</b>	<b>55272.90</b>	<b>59337.10</b>	<b>62898.60</b>	<b>65938.30</b>	<b>68500.00</b>
DKI Jakarta	9640.40	10177.90	10645.00	11034.00	11310.00	11459.60
Jawa Barat	43227.10	46709.60	49935.70	52785.70	55193.80	57137.30
Banten	10688.60	11955.20	13160.50	14249.00	15201.80	16033.10
Jawa Tengah	32443.90	33774.10	34940.10	35958.60	36751.70	37219.40
DI Yogyakarta	3467.50	3679.20	3882.30	4064.60	4220.20	4348.50
Jawa Timur	37565.80	38847.60	39886.30	40646.10	41077.30	41127.70
<b>Pulau Jawa</b>	<b>137033.30</b>	<b>145143.60</b>	<b>152449.90</b>	<b>158738.00</b>	<b>163754.80</b>	<b>167325.60</b>
Bali	3907.40	4152.80	4380.80	4586.00	4765.40	4912.40
Nusa Tenggara Barat	4516.10	4835.60	5125.60	5375.60	5583.80	5754.20
Nusa Tenggara Timur	4706.20	5120.10	5541.40	5970.80	6402.20	6829.10
<b>Bali &amp; Kep. Nusa Tengg</b>	<b>13129.70</b>	<b>14108.50</b>	<b>15047.80</b>	<b>15932.40</b>	<b>16751.40</b>	<b>17495.70</b>
Kalimantan Barat	4411.40	4789.60	5134.80	5432.60	5679.20	5878.10
Kalimantan Tengah	2220.80	2495.00	2769.20	3031.00	3273.60	3494.50
Kalimantan Selatan	3642.60	3989.80	4304.00	4578.30	4814.20	5016.30
Kalimantan Timur	3576.10	4068.60	4561.70	5040.70	5497.00	5929.20
<b>Pulau Kalimantan</b>	<b>13850.90</b>	<b>15343.00</b>	<b>16769.70</b>	<b>18082.60</b>	<b>19264.00</b>	<b>20318.10</b>

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Sulawesi Utara	2277.70	2412.10	2528.80	2624.30	2696.10	2743.70
Sulawesi Tengah	2646.00	2876.70	3097.00	3299.50	3480.60	3640.80
Sulawesi Selatan	8060.40	8520.30	8928.00	9265.50	9521.70	9696.00
Sulawesi Tenggara	2243.60	2499.50	2755.60	3003.00	3237.70	3458.10
Gorontalo	1044.80	1133.20	1219.60	1299.70	1370.20	1430.10
Sulawesi Barat	1164.60	1282.20	1405.00	1527.80	1647.20	1763.30
<b>Pulau Sulawesi</b>	<b>17437.10</b>	<b>18724.00</b>	<b>19934.00</b>	<b>21019.80</b>	<b>21953.50</b>	<b>22732.00</b>
Maluku	1541.90	1686.50	1831.90	1972.70	2104.20	2227.80
Maluku Utara	1043.30	1162.30	1278.80	1391.00	1499.40	1603.60
<b>Kep. Maluku</b>	<b>2585.20</b>	<b>2848.80</b>	<b>3110.70</b>	<b>3363.70</b>	<b>3603.60</b>	<b>3831.40</b>
Papua Barat	765.30	871.50	981.80	1092.20	1200.10	1305.00
Papua	2857.00	3149.40	3435.40	3701.70	3939.40	4144.60
<b>Pulau Papua</b>	<b>3622.30</b>	<b>4020.90</b>	<b>4417.20</b>	<b>4793.90</b>	<b>5139.50</b>	<b>5449.60</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>238518.80</b>	<b>255461.70</b>	<b>271066.40</b>	<b>284829.00</b>	<b>296405.10</b>	<b>305652.40</b>

Sumber: bps.go.id

## 2) Angka Putus Sekolah

Menurut data Pusat Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, tahun 2017/2018 jumlah siswa putus sekolah maupun lulus tidak melanjutkan angkanya masih cukup tinggi. Berdasarkan arus siswa (kohort), jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah sebanyak 277.550 orang (0,91%), lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sebanyak 273.446 orang (5,7%), putus SMP/MTs sebanyak 145,056 orang (1,07%), lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan sebanyak 402.584 orang (9,46%), putus SMA/MA sebanyak 8,293 orang (0,16%), putus SMK sebanyak 113,536 orang (2,31%). Gambaran arus siswa (kohort) sebagai berikut:



Gambar 1. Arus Siswa Sekolah Dasar Sampai Sekolah Menengah Tahun 2017 - 2018

### 3) Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 tercatat sebesar 25,95 juta jiwa dari total penduduk di Indonesia. Persentase penduduk miskin sebesar 9,82 % dari total penduduk Indonesia, dengan rincian sebagai berikut (data dalam ribuan jiwa):

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018

Provinsi	2017	2018
	September	Maret
ACEH	15.92	15.97
SUMATERA UTARA	9.28	9.22
SUMATERA BARAT	6.75	6.65
RIAU	7.41	7.39
JAMBI	7.9	7.92
SUMATERA SELATAN	13.1	12.8
BENGKULU	15.59	15.43
LAMPUNG	13.04	13.14
KEP. BANGKA BELITUNG	5.3	5.25
KEP. RIAU	6.13	6.2
DKI JAKARTA	3.78	3.57
JAWA BARAT	7.83	7.45
JAWA TENGAH	12.23	11.32
DI YOGYAKARTA	12.36	12.13

Provinsi	2017	2018
	September	Maret
JAWA TIMUR	11.2	10.98
BANTEN	5.59	5.24
BALI	4.14	4.01
NUSA TENGGARA BARAT	15.05	14.75
NUSA TENGGARA TIMUR	21.38	21.35
KALIMANTAN BARAT	7.86	7.77
KALIMANTAN TENGAH	5.26	5.17
KALIMANTAN SELATAN	4.7	4.54
KALIMANTAN TIMUR	6.08	6.03
KALIMANTAN UTARA	6.96	7.09
SULAWESI UTARA	7.9	7.8
SULAWESI TENGAH	14.22	14.01
SULAWESI SELATAN	9.48	9.06
SULAWESI TENGGARA	11.97	11.63
GORONTALO	17.14	16.81
SULAWESI BARAT	11.18	11.25
MALUKU	18.29	18.12
MALUKU UTARA	6.44	6.64
PAPUA BARAT	23.12	23.01
PAPUA	27.76	27.74
<b>Total</b>	<b>10.12</b>	<b>9.82</b>

Sumber: bps.go.id

#### 4) Angkatan kerja dan penganggur terbuka

Pada bulan Februari 2018, Data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133.939.099 jiwa, sedangkan pengangguran masih ada 6.871.264 jiwa, dengan rincian per provinsi sebagai berikut:

*Tabel 3. Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka*

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja
1	Aceh	154,128	2,354,247
2	Sumatera Utara	403,959	7,227,154
3	Sumatera Barat	152,241	2,742,269
4	Riau	188,412	3,295,969
5	Jambi	67,466	1,846,430
6	Sumatera Selatan	175,458	4,368,478
7	Bengkulu	27,944	1,033,401

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja
8	Lampung	190,442	4,395,899
9	Bangka Belitung	27,347	756,940
10	Kepulauan Riau	68,559	1,065,553
11	DKI Jakarta	290,118	5,429,203
12	Jawa Barat	1,857,425	22,773,882
13	Jawa Tengah	771,084	18,234,221
14	DI Yogyakarta	65,605	2,142,046
15	Jawa Timur	809,449	21,004,695
16	Banten	472,754	6,088,115
17	Bali	22,345	2,607,288
18	Nusa Tenggara Barat	83,210	2,459,021
19	Nusa Tenggara Timur	76,326	2,559,204
20	Kalimantan Barat	106,340	2,560,629
21	Kalimantan Tengah	44,416	1,397,229
22	Kalimantan Selatan	84,478	2,190,811
23	Kalimantan Timur	125,167	1,815,260
24	Kalimantan Utara	16,272	347,623
25	Sulawesi Utara	76,389	1,253,887
26	Sulawesi Tengah	50,082	1,570,386
27	Sulawesi Selatan	224,885	4,174,181
28	Sulawesi Tenggara	35,894	1,286,623
29	Gorontalo	22,551	622,395
30	Sulawesi Barat	16,244	663,276
31	Maluku	56,958	772,174
32	Maluku Utara	27,369	587,972
33	Papua Barat	26,129	461,152
34	Papua	53,818	1,851,486
<b>Jumlah</b>		<b>6,871,264</b>	<b>133,939,099</b>

Sumber: bps.go.id

## b. Potensi

### 1) Jumlah LKP menurut provinsi

Berdasarkan hasil validasi data tahun 2018, jumlah LKP yang sudah terdaftar ke dalam DAPODIK adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. Jumlah LKP menurut Provinsi*

NO	PROVINSI	JUMLAH
1	Prov. D.K.I. Jakarta	902
2	Prov. Jawa Barat	2,460
3	Prov. Jawa Tengah	1,394
4	Prov. D.I. Yogyakarta	214
5	Prov. Jawa Timur	2,196
6	Prov. Aceh	416
7	Prov. Sumatera Utara	1,435
8	Prov. Sumatera Barat	267
9	Prov. Riau	412
10	Prov. Jambi	447



NO	PROVINSI	JUMLAH
11	Prov. Sumatera Selatan	373
12	Prov. Lampung	602
13	Prov. Kalimantan Barat	277
14	Prov. Kalimantan Tengah	162
15	Prov. Kalimantan Selatan	350
16	Prov. Kalimantan Timur	306
17	Prov. Sulawesi Utara	296
18	Prov. Sulawesi Tengah	444
19	Prov. Sulawesi Selatan	544
20	Prov. Sulawesi Tenggara	205
21	Prov. Maluku	111
22	Prov. Bali	570
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	493
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	211
25	Prov. Papua	70
26	Prov. Bengkulu	210
27	Prov. Maluku Utara	138
28	Prov. Banten	520
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	155
30	Prov. Gorontalo	138
31	Prov. Kepulauan Riau	305
32	Prov. Papua Barat	35
33	Prov. Sulawesi Barat	134
34	Prov. Kalimantan Utara	38
	<b>TOTAL</b>	<b>16,830</b>

Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>, 26 Desember 2018

## B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program oleh Pembinaan Kursus dan Pelatihan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penilaian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review LAKIP;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2013, sebagaimana telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 22 tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun Anggaran 2016 nomor SP DIPA–023.05.1.666870/2018, Revisi 01 tanggal 28 Mei 2018.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;
5. Pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan;
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan;
10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri atas:

1. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
2. Subdirektorat Kurikulum;
3. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
4. Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik dan Kemitraan;
5. Subbagian Tata Usaha.

### **Subdirektorat Program dan Evaluasi**

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kursus dan pelatihan;
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat;
4. Penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran direktorat serta pendanaan kursus dan pelatihan;
6. Penyusunan laporan direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi terdiri atas Seksi Program dan Seksi Evaluasi.

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta penyusunan bahan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan.
2. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan kursus dan pelatihan serta penyusunan laporan Direktorat.

### **Subdirektorat Kurikulum**

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pembinaan kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan; dan
5. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas Seksi Pembelajaran dan Seksi Penilaian:

1. Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu pembelajaran, evaluasi, dan laporan di bidang pembelajaran kursus dan pelatihan.
2. Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu penilaian, evaluasi, dan laporan di bidang penilaian dan sertifikasi kursus dan pelatihan.

#### **Subdirektorat Sarana dan Prasarana**

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana dan prasarana, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan dan fasilitasi sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kursus dan pelatihan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas Seksi Sarana dan Seksi Prasarana:

- A. Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana, fasilitasi penjaminan mutu sarana, evaluasi, dan laporan di bidang sarana kursus dan pelatihan.
- B. Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi prasarana, fasilitasi penjaminan mutu prasarana, evaluasi, dan laporan di bidang prasarana kursus dan pelatihan.

### **Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan**

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan.

Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
2. Penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;
3. Penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;
4. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu tata kelola kursus dan pelatihan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan kemitraan kursus dan pelatihan.

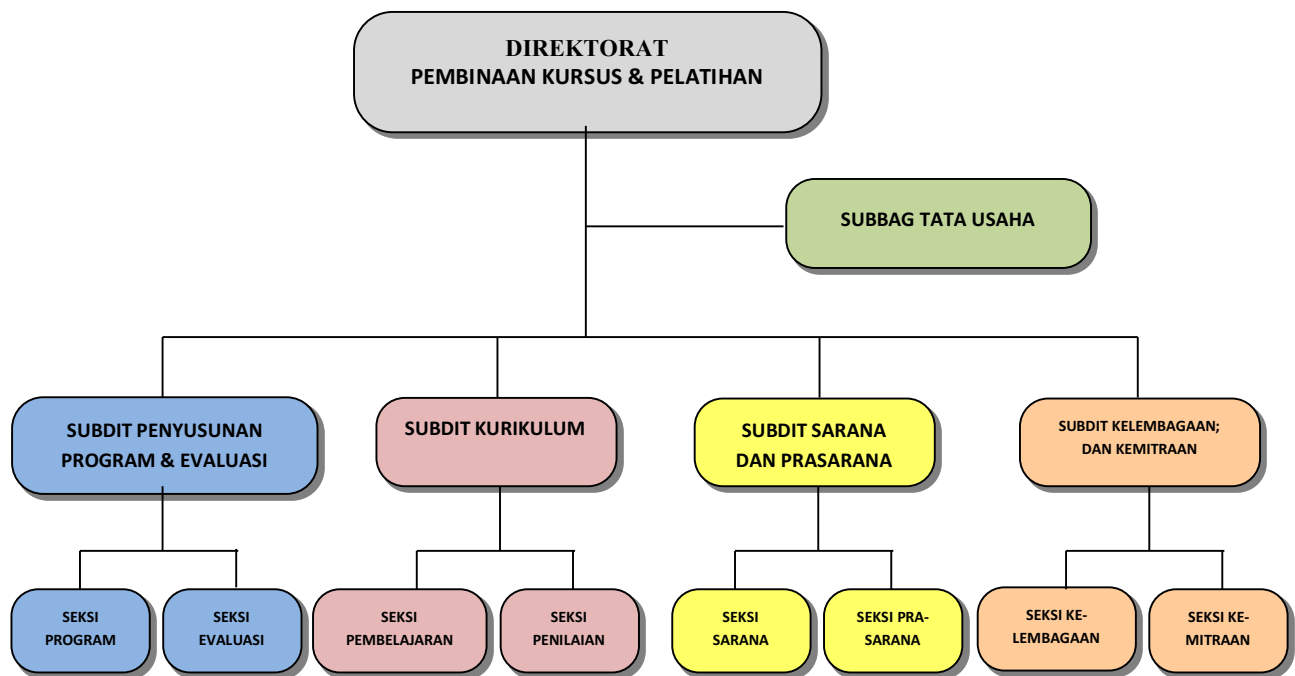
Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan terdiri atas Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik serta Seksi Kemitraan.

1. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, serta pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola dan peserta didik kursus dan pelatihan.
2. Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan kursus dan pelatihan.

### **Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagan struktur organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Data ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) subbagian Tata Usaha. Berikut disajikan data pegawai Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan setiap unit kerja:

Tabel 5. Data Ketenagaan  
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Per Subdit

NO	Subdit	JUMLAH			Total	%
		PNS	CPNS	Honorer		
1	Direktur	1	-	-	1	1.06%
2	Subdit Program dan Evaluasi	10	-	2	12	12.77%
3	Subdit Kurikulum	13	2	2	15	18.09%
4	Subdit Sarana dan Prasana	13	-	2	15	15.96%
5	Subdit Kelembagaan dan Kemitraan	11	-	2	13	13.83%
6	Subbagian Tata Usaha	22	-	13	25	38.30%
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa pegawai yang berstatus PNS sebanyak 70 orang atau 74,47% , CPNS sebanyak 2 orang atau 2,13% dan honorer sebanyak 22 orang atau 23,40%.



Tabel 6. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus & Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Honorar	Jumlah	%
1	Laki-laki	36	1	17	54	57,45%
2	Perempuan	34	1	5	40	42,55%
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas bisa jelaskan bahwa pegawai masih didominasi dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 57,45% sedangkan perempuannya hanya 42,55%.

Tabel 7. Data Ketenagaan Direktorat Pembinaan Kursus & Pelatihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	CPNS	Honorar	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-	0.00%
2	SMP	1	-	-	1	1.06%
3	SMA	15	-	14	29	30.85%
4	Diploma	2	-	4	6	6.38%
5	Sarjana	33	2	4	39	41.49%
6	Master	16	-	-	16	17.02%
7	Doktor	3	-	-	3	2.13%
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan, dapat dikatakan bahwa Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki SDM cukup baik dengan mayoritas berpendidikan sarjana (41,49%). Sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai saat ini terdapat 4 orang pegawai sedang melaksanakan izin belajar dan 1 orang pegawai sedang melaksanakan tugas belajar. Akan lebih baik lagi jika yang belum sarjana, didorong untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, bekerja sambil belajar, sehingga PNS diharapkan berpendidikan sarjana mencapai sedikitnya 75%.

#### D. Isu Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global.

Yang menjadi isu utama dalam sasaran strategis yaitu adalah terkait dengan kesiapan setiap warga masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sekarang sudah berjalan serta masalah pengangguran dan kemiskinan. Daya saing individu menjadi tugas utama bagi institusi untuk dapat terus dikembangkan agar dapat bersaing di dunia internasional. Selain itu diperlukannya perspektif baru dalam pengembangan dan revitalisasi program pendidikan kejuruan melalui pendidikan nonformal yang lebih berkualitas dalam rangka penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang proporsional baik di perdesaan maupun perkotaan.

Kesepakatan antar negara ASEAN membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 dan sudah berjalan sejak awal tahun 2017 ini merupakan bentuk realisasi dan tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal yang menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. **Pertama**, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah besar dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. **Kedua**, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang akan menciptakan iklim persaingan yang adil meliputi perlindungan terhadap sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman dan terintegrasi, menghilangkan sistem *double taxation*, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*. **Ketiga**, MEA akan memprioritaskan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan meningkatkan kemampuan daya saing dan dinamisme UKM dan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan serta teknologi. **Keempat**, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global (*ASEAN Economic Blueprint*).

Bagi Indonesia, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena

dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Pada tahap awal pelaksanaan MEA, sudah disepakati 18 jenis jabatan pekerjaan atau keterampilan yang siap dibuka bagi para pekerja dari dan ke berbagai wilayah atau negara di Asia Tenggara. Jenis pekerjaan atau ketrampilan tersebut, antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, arsitektur, pendidikan, akuntan, pariwisata, pelayanan hukum, telekomunikasi, layanan teknik, komputer dan layanan yang terkait dengan komputer, lingkungan, audio visual, energi, konstruksi, logistik, pengiriman barang, maritim dan distribusi barang serta jasa. Yang menjadi kendala dari sisi ketenagakerjaan adalah sisi pendidikan dan produktifitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta pondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013). Selain itu kendala lain muncul ketika recognisi terhadap sertifikat kompetensi vokasi/keahlian yang dihasilkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau lembaga sertifikasi profesi belum diakui oleh negara-negara di ASEAN.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka sejak Bulan Januari 2012 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan (formal, nonformal dan informal) dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan, pengalaman kerja atau dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Skotlandia, Hongkong dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah di setarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi yang dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau

dari sisi penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah banyak secara kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan sebagai proses utama pengembangan sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk mencapai 236 juta pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), maka diperkirakan jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka menyongsong terjadinya “bonus demografi” yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

Di dalam agenda pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam 9 Nawacita yang sudah disusun, pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan produktivitas rakyat. Hal tersebut tertuang didalam Nawacita ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dan Nawacita ke 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Era perubahan zaman yang sangat cepat tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak pernah ada lagi batasnya, sehingga membawa peradaban memasuki kehidupan manusia revolusi industri 4.0.

Revolusi industri ke 4 dimulai dengan revolusi internet pada tahun 90'an. Pemanfaatan Internet of things pertama kali dilakukan oleh Jerman. Jerman pula lah yang mengglobalkan istilah industri 4.0.

Perkembangan penggunaan internet dan teknologi digital sebagai tulang punggung pergerakan dan jaringan konektivitas manusia dan mesin. Hal ini akan berdampak berbagai aktivitas manusia untuk bidang IPTEK serta pendidikan tinggi.

Tantangan ini harus direspon secepat karena evolusi industri 4.0 perlu di cermati oleh semua pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan, agar meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global, terutama pendidikan vokasi.

Revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan perubahan ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber-fisik, ***Internet of Things (IoT)***, komputasi awan dan komputasi kognitif.

Permasalahan muncul ketika masih banyak lembaga kursus dan pelatihan dalam pengelolaan manajemen LKP maupun dalam proses pengelolaan belajar mengajar masih menggunakan metode klasikal sedangkan peserta didik yang belajar adalah peserta didik milenial yang dekat dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *gadget*. Perubahan sistem pengelolaan LKP baik dari segi manajemen pemasaran, manajemen dokumen maupun keuangan dengan menggunakan media digital (*digital marketing, document and financing*) akan sangat bagus dan mempermudah dalam rangka memperluas akses pendidikan vokasi. Sedangkan proses belajar mengajar secara langsung akan menyesuaikan dengan menggunakan *Massive Open Online Courses (MOOC)*. Sistem ini akan berpengaruh terhadap penguasaan instruktur terhadap materi ajar, bahan ajar yang semula dalam bentuk cetak ke audio visual, serta staf dalam mengelola manajemennya.

## PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

### A. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Untuk menjawab tantangan isu strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019, diperlukan sebuah komitmen bersama seluruh pihak yang berada di dalam unit kerja yang sama. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku pucuk pimpinan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, memiliki tanggung jawab untuk memperoleh capaian target sebagaimana telah dituangkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019.

Perjanjian kinerja Tahun 2018 merupakan sebuah bentuk dokumen yang berisi tentang komitmen kesepakatan kerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat selaku pemberi amanah dengan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku penerima amanah, dalam tugasnya untuk menjawab isu strategis yang tertuang di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 - 2019. Di dalamnya mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang harus dicapai serta anggaran dari program-program yang disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari Januari hingga Desember 2018. Dalam hal ini, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkomitmen melaksanakan tugas dan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan. Sesuai fungsinya selaku pimpinan Unit Kerja yang memiliki beberapa subdirektorat di dalamnya, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkomitmen untuk: 1) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 3) meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan; 4) memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan; 5) mempertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang

diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan; 6) memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan; 7) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; 8) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan; 9) melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan; dan 10) melaksanakan administrasi Direktorat.

## **B. Target Capaian dan Indikator Kinerja**

Target yang harus dicapai oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dijabarkan dalam sasaran strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, yaitu “Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, Berwawasan Gender, Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan Global”.

Dalam upaya pencapaiannya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 13 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan 2 indikator kinerja pendukung serta 5 output dari program-program yang dilaksanakan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk mendukung IKK tersebut. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan organisasi, dari 13 indikator kinerja utama tersebut terdapat 2 indikator yang sudah tidak menjadi tanggungjawab Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Tenaga Kerja RI dan juga menjadi tanggungjawab UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas . Indikator kinerja tersebut kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan dari program-program yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja menunjuk pada target-target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan relevan pada kurun waktu tertentu (SMART). Penetapan indikator kinerja ini telah melalui proses identifikasi sesuai dengan kewenangan dan fungsi unit kerja, konsultasi sesuai dengan rencana strategis arah kebijakan umum, penilaian dan pemilihan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengelolalan keuangan dan kinerja, untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah indikator kinerja sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam sebuah akuntabilitas.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2018 mengelola anggaran sebanyak Rp 376.601.992.000 berdasarkan DIPA awal yang terbit pada tanggal 5 Desember 2017 dan pada tanggal 28 Mei 2018 dilakukan revisi pertama sehingga total anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menjadi sebanyak Rp. 366.014.392.000.

Sesuai amanat Perjanjian Kinerja, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah mengelola anggaran berdasarkan DIPA diatas dengan didukung oleh tiga belas indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja, kinerjanya ditargetkan sebesar 65.000 orang dengan anggaran Rp.159.970.200.000, setelah revisi pertama target kinerjanya tetap sebesar 65.000 orang dengan anggaran berubah menjadi Rp. 158.439.100.000.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh satu output yaitu Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja, dengan kegiatan penyusunan reviu petunjuk teknis bantuan PKK, penilaian dan verifikasi proposal PKK, pemberian bantuan pendidikan kecakapan kerja, orientasi teknis penyelenggaraan PKK dan manajemen pengelolaan dana bantuan PKK serta pemberian bantuan uji kompetensi.

2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha, kinerjanya ditargetkan sebesar 47.000 orang dengan anggaran sebesar Rp.146.657.605, setelah revisi target kinerjanya tetap sebesar 47.000 orang dengan anggaran berubah menjadi Rp.146.053.155.000.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh satu output yaitu Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha, dengan kegiatan penyusunan /reviu petunjuk teknis bantuan pemerintah PKW, penilaian dan verifikasi proposal PKW, pemberian bantuan PKW, orientasi teknis penyelenggaraan PKW, dan manajemen pengelolaan dana bantuan PKW.

3. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan, kinerjanya ditargetkan sebesar 100 lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 7.782.400.000 , setelah revisi target kinerjanya tetap sebesar 100 lembaga dengan anggaran berubah menjadi Rp.7.944.900.000



Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh satu output yaitu lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan, dengan satu kegiatan yang meliputi penyelenggaraan bantuan sarana praktek kursus dan pelatihan, penilaian dan verifikasi bantuan sarana praktek kursus dan pelatihan, orientasi teknis penyelenggara bantuan sarana praktek kursus dan pelatihan dan pendampingan teknis bantuan sarana praktek, penyusunan dan finalisasi petunjuk pelaksanaan sarana praktek kursus dan pelatihan.

4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan, kinerjanya ditargetkan sebesar 66 naskah dengan anggaran sebesar Rp. 10.178.240.000, setelah revisi target kinerjanya menjadi sebesar 69 naskah dengan anggaran berubah menjadi Rp. 8.084.890.000.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh satu output yaitu Norma Standar Prosedur dan Kriteria kursus dan pelatihan dengan kegiatan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, penyusunan standar sarana dan prasarana, penyusunan standar pengelolaan, penyusunan bahan ajar audio visual, penyusunan bahan ajar cetak (mencetak bahan ajar 2017), penyusunan dan finalisasi standar kompetensi lulusan.

5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan, kinerjanya ditargetkan 954 lembaga dengan anggaran sebesar Rp.10.308.435.000, setelah revisi target kinerjanya menjadi 794 lembaga dengan anggaran berubah menjadi Rp. 9.387.100.000.

Perealisasi target indikator tersebut didukung oleh satu output yaitu lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan dengan kegiatan lembaga sertifikasi memperoleh peningkatan kapasitas, bantuan pembinaan organisasi mitra kursus dan pelatihan, koordinasi program kursus dan pelatihan dengan instansi terkait, lomba lembaga kursus dan pelatihan tingkat nasional, evaluasi diri lembaga kursus dan pelatihan, pendayagunaan data dapodik kursus dan pelatihan, penyelerasan program kursus dan pelatihan dengan DUDI dan validasi pengembangan model kursus dan pelatihan.

6. Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi. IKK ini tidak ditargetkan di tahun 2018 dikarenakan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan akan tetapi menjadi tugas dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja RI.

7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan kinerjanya ditargetkan 105 lembaga dengan anggaran sebesar Rp.3.159.300.000, setelah revisi target kinerjanya tetap dengan anggaran berubah menjadi Rp. 3.007.200.000.

Perealisasi target indikator tersebut didukung oleh output lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan dengan kegiatan bantuan pembinaan LSK dan TUK.

8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi kinerjanya ditargetkan 15.000 orang dengan anggaran sebesar Rp.8.248.450.000, setelah revisi target kinerjanya tetap dengan anggaran berubah menjadi Rp. 8.458.420.000.

Perealisasi target indikator tersebut didukung oleh satu output yaitu peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi dengan kegiatan pemberian bantuan pelaksanaan uji kompetensi.

9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis kinerjanya ditargetkan 220 lembaga dengan anggaran sebesar Rp.1.317.650.000, setelah revisi target kinerjanya tetap 220 lembaga dengan anggaran berubah menjadi Rp. 2.330.910.000.

Perealisasi target indikator tersebut didukung oleh dua output yaitu 1) lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan dengan kegiatan bimbingan teknis manajemen lembaga kursus dan pelatihan dan, 2) output peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi dengan kegiatan pengujian dan master pengujian berupa bimbingan teknis lembaga sertifikasi kompetensi dan tempat uji kompetensi.

10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi kinerjanya ditargetkan 2.280 lembaga dengan anggaran sebesar Rp.2.668.000.000, setelah revisi target kinerjanya tetap 2.280 lembaga dengan anggaran berubah menjadi Rp. 579.385.000.

Perealisasi target indikator tersebut didukung oleh output lembaga kursus dan Pelatihan mendapatkan penguatan dengan kegiatan verifikasi dan validasi data LKP integrasi dengan data pokok pendidikan pada dinas kab/kota.

11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siapa di akreditasi). IKK sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat

Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi menjadi tugas pokok dan fungsi UPT PP-PAUD dan DIKMAS dan BP-PAUD dan DIKMAS.

12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi kinerjanya ditargetkan 100 orang dengan anggaran sebesar Rp.708.220.000, setelah revisi target kinerjanya tetap 100 orang dengan anggaran berubah menjadi Rp. 592.090.000.

Perealisasi target indikator tersebut didukung oleh output peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi dengan kegiatan penguji dan master penguji berupa pelatihan dan sertifikasi master penguji dan penguji uji kompetensi.

13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI) kinerjanya ditargetkan 1000 orang dengan anggaran sebesar Rp.3.568.800.000, setelah revisi target kinerjanya tetap 1000 orang dengan anggaran berubah menjadi Rp. 3.481.300.000.

Perealisasi target indikator tersebut didukung oleh output peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi dengan kegiatan magang peserta didik.

Dalam upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, memerlukan sebuah kerjasama tim (*teamwork*) yang solid dan didukung oleh kualitas SDM yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan program-programnya. Setiap Kepala Subdirektorat yang ada di dalam unit kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memiliki tanggungjawab untuk membawa timnya kepada keberhasilan pencapaian target output yang telah ditetapkan.

## AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2018, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut

### A. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2018, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan satu sasaran strategis yaitu “Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global” yang didukung oleh 13 indikator kinerja kegiatan utama yaitu: 1) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja; 2) Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha; 3) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan; 4) Jumlah standar program kursus dan pelatihan; 5) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan; 6) Jumlah Jenis Kompetensi Lulusan Terstandarisasi (*tidak ditargetkan*); 7) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan; 8) Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji Kompetensi; 9) Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan mendapatkan bimbingan teknis; 10) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi; 11) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap diakreditasi) (*tidak ditargetkan*); 12) Jumlah master penguji dan penguji

kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi; 13) Jumlah Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dari ketiga belas IKK tersebut, ada 2 IKK yang secara fungsi sudah bukan menjadi kewenangan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yaitu “IKK [6] & IKK [11]”, Jumlah jenis kompetensi kerja lulusan terstandarisasi dan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siapa diakreditasi)” sudah menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja RI dan UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas melalui program pemetaan mutu lembaga sejak tahun 2017.

Hingga akhir tahun 2018 IKK tersebut tidak semuanya bisa mencapai target 100 persen dan ada juga yang melebihi 100 persen. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran kepada program prioritas maupun adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal dan pertengahan tahun 2018. Berikut tingkat ketercapaian tiga belas belas indikator kinerja kegiatan utama dan dua indikator kinerja pendukung dari sasaran strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan hingga akhir tahun 2018 yang diuraikan berdasarkan pengukuran kinerja.

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2017-2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan/Output)		Target 2018		Realisasi 2017				Realisasi 2018						
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%			
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja.	50,000	Orang	158,439,100,000	50,014	Orang	55,57 %	94,164,305,500	99,98%	65,040	Orang	130.08 %	158,151,911,425	99.82%
	-	Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja													
	2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha	90,000	Orang	146,053,155,000	40,035	Orang	100,03 %	116,233,822,100	99,98%	47,365	Orang	52.63%	144,763,511,151	99.12%
	-	Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha													
	3	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan	20	Lembaga	7,944,900,000	136	Kab/Kota	680%	6,868,933,500	99,88%	168	Lembaga	840%	7,927,139,600	99.78%
	-	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan													
	4	Jumlah standar program kursus dan pelatihan	40	Naskah	8,084,890,000	37	Naskah	100%	3,106,170,000	96,32%	79	Naskah	197.50 %	7,622,990,100	94.29%
	-	Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan													
	5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	900	Lembaga	9,387,100,000	759	Lembaga	84,33%	6,739,833,964	99,79%	832	Lembaga	92.44%	9,174,365,435	97.73%
	-	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan													
	6	Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi	5		-	32	Naskah	640%	3,103,396,000	99,63%	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan/Output)		Target 2018		Realisasi 2017				Realisasi 2018						
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%			
	-	Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan													
7		Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan	438	Lembaga	3,007,200,000	225	Lembaga	64,29%	2,355,244,000	99,49%	390	Lembaga	89.04%	2,413,555,400	80.26%
	-	Lembaga kursus dan pelatihan mendapat penguatan													
8		Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	140,000	Orang	8,458,420,000	46,236	Orang	33,03%	24,406,250,093	99,94%	90,326	Orang	64.52%	8,453,574,700	99.62%
	-	Peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi													
9		Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	1,022	Lembaga	2,330,910,000	474	Lembaga	46,38%	2,660,673,400	99,82%	382	Lembaga	37.38%	2,328,306,300	99.89%
	-	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan													
	-	Peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi													
10		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	5,298	Lembaga	579,385,000	13,101	Lembaga	252,23 %	748,088,000	99,72%	4,026	Lembaga	75.99%	578,473,000	99.84%
	-	Lembaga kursus dan pelatihan mendapat penguatan													
11		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap di akreditasi)	3,500	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji	1,946	Orang	592,090,000	374	Orang	23,07%	739,032,050	99,41%	124	Orang	6.37%	591,038,600	99.82%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan/Output)	Target 2018		Realisasi 2017				Realisasi 2018						
		Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	%	Anggaran	%			
	kompetensi													
	- Peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi													
13	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	40,000	Orang	3,481,300,000	2,030	Orang	6,77%	4,121,293,954	99,96%	1000	Orang	2.50%	3,463,320,451	99.48%
	- Peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi													
14	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	2	Dokumen	3,622,658,000	3	Dokumen	100%	3,010,382,500	99,02%	3	Dokumen	150%	3,066,891,900	84.66%
	- Layanan dukungan manajemen eselon 1													
15	Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	4	Dokumen		14	Dokumen	350%	8,460,334,665	84,84%	4	Dokumen	100%		
	- Layanan dukungan manajemen eselon 1	4	Layanan	2,702,010,000						4	Layanan		3,249,501,200	120.26%
	- Layanan internal (overhead)	3	Layanan	671,234,000						3	Layanan		667,168,200	99.39%
	- Layanan perkantoran	12	Bulan	9,823,000,000						12	Bulan		8,349,813,263	85.00%

*Keterangan: IKK 14 & 15 adalah IKK yang tidak termasuk di dalam perjanjian kinerja*



## 1. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja

Realisasi dari IKK ini adalah 60.040 orang peserta didik (130,08%) dari target renstra sebanyak 50.000 orang peserta didik. Terdiri dari 62.390 orang realisasi program PKK, 540 orang realisasi program PKKU, dan 2110 orang realisasi program PKK Pendidik PAUD. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 65.000 orang peserta didik, maka realisasi IKK ini adalah sebesar 100,06%. Penghitungan angka capaian ini belum termasuk jumlah peserta didik yang belajar vokasi secara mandiri dengan tujuan untuk bekerja maupun yang mendapatkan program sejenis baik dari APBD I, APBD II maupun Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.

Perealisasi IKK ini melebihi target. Hal ini dimungkinkan karena pada program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) dimana pada awalnya besaran dana yang disalurkan pada setiap lembaga sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), realisasinya menjadi bervariasi disesuaikan dengan kelayakan kebutuhan dan jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara program PKKU. Dari sasaran awal yaitu sebanyak 500 peserta didik melebihi target menjadi 540 peserta didik.



Gambar 3. Program Pembelajaran PKK Jenis Ketrampilan Baby Sitter

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) atau *life skill* secara umum diartikan sebagai interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada kursus dan pelatihan dimaknai sebagai program keterampilan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal khususnya lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga lainnya yang mempunyai fungsi pendidikan vokasi untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja pada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada sektor formal sesuai dengan peluang kerja yang ada. Program tersebut serupa dengan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diselenggarakan pada kurun waktu 2010 - 2015.

Untuk mengoptimalkan *outcome* program tersebut, lembaga yang menyelenggarakan program PKK ini harus menggunakan metode 4 in 1 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyelenggara diprioritaskan memiliki informasi lowongan kerja (*job order*) dari unit-unit usaha atau industri yang bersedia menerima lulusan;
- b. Peserta didik dilatih sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja dan kompetensi yang dibutuhkan meliputi pengetahuan tentang etos kerja, kemampuan manajerial, sikap dan tata nilai, peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kurikulum yang wajib digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau kurikulum/silabus yang diterbitkan oleh instansi lain atau lembaga yang bersangkutan untuk jenis-jenis keterampilan yang belum tersedia KBK-nya;
- c. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik wajib diikutsertakan dalam uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Jika jenis pendidikan/keterampilan yang diselenggarakan belum ada LSK-nya maka uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang diakui dan dibina oleh kementerian/lembaga pemerintah yang relevan;

d. Menyalurkan lulusannya untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu seperti warga masyarakat tidak mampu yang diprioritaskan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau anggota keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS), putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), belum pernah mengikuti program sejenis dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebelumnya, belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur, berusia 16-35 tahun, bukan peserta didik reguler pada lembaga kursus penyelenggara PKK, serta tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD atau sumber lain seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).



Gambar 4. Pembelajaran PKK Jenis Keterampilan Bidang Spa

Pemberian bantuan pemerintah program PKK ini didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya review petunjuk teknis bantuan PKK, penilaian dan verifikasi proposal, orientasi teknis bagi penyelenggara program bantuan PKK, bimbingan teknis program bantuan serta manajemen pengelolaan dana bantuan. Bimbingan teknis program bantuan diselenggarakan untuk memberikan pelatihan mengenai pengelolaan bantuan pemerintah dari proses seleksi, verifikasi hingga penetapan usulan ke Ditbinsuslat kepada utusan 29 UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas, dikarenakan tahun 2017 merupakan pertama kalinya UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas diberikan wewenang dalam seleksi bantuan pemerintah PKK sampai pada pengusulan calon penyelenggara.

Pelaksanaan program PKK ini disalurkan melalui Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan), namun proses seleksi tidak hanya dilakukan di Pusat namun juga dilakukan oleh PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas yang merupakan

UPT Ditjen PAUD dan Dikmas di 29 provinsi. Sedangkan seleksi PKKU dilakukan di Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan). Penyelenggaraan program PKK tahun 2018 ini juga bekerjasama dengan Universitas Terbuka untuk program PKK bagi pendidik PAUD dan BNP2TKI dalam penempatan tenaga kerja ke korea untuk bidang *fishing*. Berikut ini adalah realisasi PKK di tingkat provinsi dan pusat.

Tabel 9. Jumlah Realisasi Program PKK Tahun 2018

NO	PROVINSI	PKK			PKKU		
		LMBG	PD	DANA	LMBG	PD	DANA
1	Aceh	78	1,750	2,975,000,000			
2	Bali	35	1,215	2,065,500,000	4	100	950,000,000
3	Bangka Belitung	2	70	119,000,000			
4	Banten	49	1,270	2,159,000,000			
5	Bengkulu	33	870	1,479,000,000			
6	DI Yogyakarta	22	540	918,000,000	2	30	200,000,000
7	DKI Jakarta	30	1,270	2,159,000,000	2	40	280,000,000
8	Gorontalo	45	1,020	1,734,000,000			
9	Jambi	32	750	1,275,000,000			
10	Jawa Barat	332	8,640	14,688,000,000	3	65	487,500,000
11	Jawa Tengah	294	8,626	14,664,200,000	3	90	855,000,000
12	Jawa Timur	432	10,485	17,824,500,000	1	35	32,500,000
13	Kalimantan Barat	36	800	1,360,000,000			
14	Kalimantan Selatan	22	510	867,000,000			
15	Kalimantan Tengah	12	350	595,000,000			
16	Kalimantan Timur	39	870	1,479,000,000	2	45	357,500,000
17	Kalimantan Utara	2	80	136,000,000			
18	Kepulauan Riau	9	265	450,500,000			
19	Lampung	78	2,045	3,476,500,000	1	30	285,000,000
20	Maluku	7	155	263,500,000			
21	Maluku Utara	10	265	450,500,000			
22	Nusa Tenggara Barat	35	770	1,309,000,000	1	30	285,000,000
23	Nusa Tenggara Timur	17	410	697,000,000			
24	Papua	7	150	255,000,000			
25	Papua Barat	2	40	68,000,000			
26	Riau	36	780	1,326,000,000			

NO	PROVINSI	PKK			PKKU		
		LMBG	PD	DANA	LMBG	PD	DANA
27	Sulawesi Barat	34	745	1,266,500,000			
28	Sulawesi Selatan	128	3,059	5,200,300,000			
29	Sulawesi Tengah	66	1,535	2,609,500,000			
30	Sulawesi Tenggara	47	1,120	1,904,000,000			
31	Sulawesi Utara	30	785	1,334,500,000	1	25	237,500,000
32	Sumatera Barat	64	1,725	2,932,500,000			
33	Sumatera Selatan	59	1,505	2,558,500,000	1	20	190,000,000
34	Sumatera Utara	372	7,920	13,464,000,000	1	30	285,000,000
35	PKK PAUD	1	2110	3.587.000.000			
	<b>Total</b>	<b>2497</b>	<b>64.500</b>	<b>109.650.000.000</b>	<b>22</b>	<b>540</b>	<b>4,745,000,000</b>

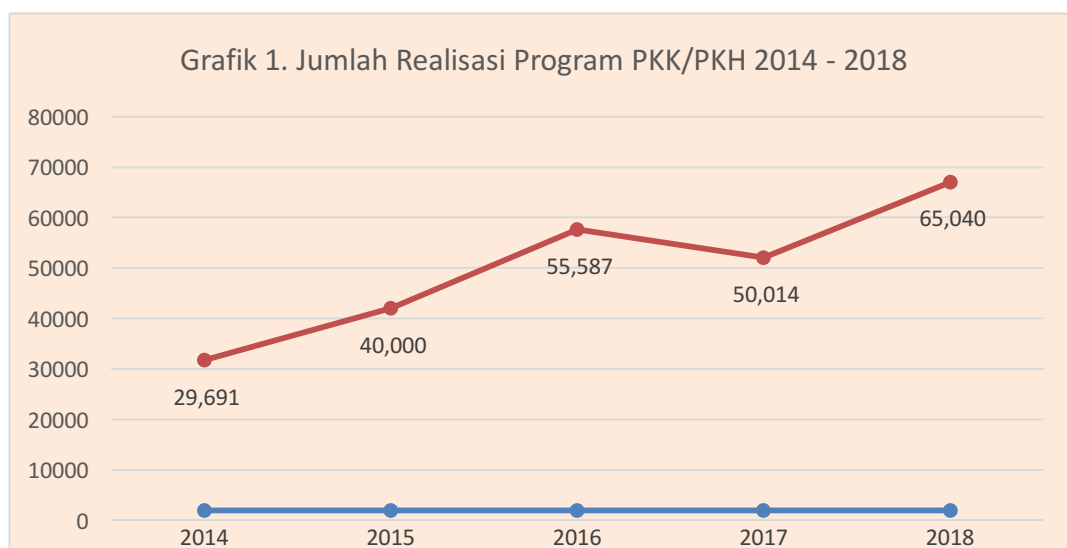
Ketercapaian IKK ini dilihat hanya melalui satu output, yaitu: Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja. Berikut tingkat ketercapaian output Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja:

Tabel 10. Capaian IKK 1 Tahun 2017 – 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan keterampilan kerja	50.000 Orang	50.014 Orang	100,03%	65.000	65.040	100,06%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa output Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja” jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan di tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Hal tersebut seiring dengan peningkatan jumlah sasaran yang sebelumnya ditargetkan sebesar 50.000 orang di tahun 2017 menjadi 65.000 orang di tahun 2018. Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2019 sebesar 320.000 orang peserta didik, maka sampai dengan tahun 2018

telah tercapai sebanyak 210.641 orang peserta didik atau 65,79%. Berikut adalah realisasi IKK tersebut selama 5 tahun terakhir:



Walaupun kinerja telah mencapai bahkan melebihi target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses penetapan petunjuk teknis program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Perdirjen PAUD dan Dikmas) yang lama menyebabkan proses penilaian proposal, verifikasi lapangan, dan penetapan lembaga penerima dana terlambat dilaksanakan.
- b. Masih banyak lembaga yang terakreditasi C dan lembaga yang belum terakreditasi mengirimkan proposalnya ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang seharusnya sesuai petunjuk teknis program PKK, proposal dari lembaga tersebut dikirim ke Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP PAUD dan Dikmas) di setiap Provinsi, hal tersebut menyebabkan proposal yang diterima oleh PP/BP PAUD dan Dikmas kurang sehingga pelaksanaan penilaian proposal dan verifikasi lapangan terlambat dilaksanakan.
- c. Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan dari PP/BP PAUD dan Dikmas yang terlambat tersebut (point b), menyebabkan terlambatnya penetapan lembaga penyelenggara program PKK, sehingga pelaksanaan program PKK di lembaga terlambat dilaksanakan bahkan bisa melewati tahun anggaran 2018.

- d. Belum terintegrasinya data-data lembaga yang mengajukan proposal bantuan pemerintah khususnya program PKK dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) pada tahun berjalan (2018), hal ini seringkali menyebabkan terjadinya duplikasi pada proses penetapan lembaga penerima dana bantuan program PKK dan program PKW.
- e. Pelaksanaan uji kompetensi peserta didik program PKK disesuaikan dengan jadwal uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), hal ini seringkali menyebabkan terlalu lamanya uji kompetensi dilaksanakan dan sertifikat kompetensi pun terlambat diterima oleh peserta didik program PKK yang lulus uji kompetensi.
- f. Penyaluran kerja peserta didik belum terdata dengan baik di lembaga penyelenggara program PKK, sehingga sulit untuk mengukur tingkat ketercapaian outcome program PKK.
- g. Pada beberapa lembaga dengan jenis keterampilan tertentu seperti; Tata Busana/Menjahit, Tata Boga, Tata Kecantikan Rambut dan Kulit, Tata Rias Pengantin, Teknisi Komputer, Teknisi HP, dan Teknisi AC proses penyaluran kerja peserta didiknya hampir 50% lebih membuka usaha mandiri (wirausaha)

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan petunjuk teknis program PKK harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran sebelumnya sehingga pada awal bulan Januari pada tahun anggaran baru petunjuk teknis tersebut bisa ditetapkan menjadi Perdirjen PAUD dan Dikmas.
- b. Memanfaatkan agenda rapat koordinasi dengan para *stake holder* seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, PP/BP PAUD dan Dikmas, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), Organisasi Mitra, Yayasan, Instansi/Lembaga Pendidikan Vokasi, Lembaga Penyelenggara Kursus, dan LSK. untuk mensosialisasikan program bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan khususnya program PKK.
- c. Selain sosialisasi pada agenda rapat koordinasi (point b), sosialisasi program PKK dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu; portal

resmi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan saluran media sosial seperti; *whats up group, facebook, youtube* dan lain sebagainya.

- d. Proposal dari lembaga yang terakreditasi C dan lembaga yang belum terakreditasi yang dikirim ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (pusat) sementara tetap dinilai oleh tim penilai pusat dengan tetap memberikan informasi terkait proposal dari lembaga-lembaga tersebut ke PP/BP PAUD dan Dikmas yang bersangkutan. Pada tahun anggaran berikutnya apabila ada proposal dari lembaga yang terakreditasi C dan lembaga yang belum terakreditasi dikirim ke pusat maka secara bertahap akan dikembalikan ke PP/BP PAUD dan Dikmas yang bersangkutan untuk dinilai.
- e. Melakukan *cross check* data lembaga yang mengajukan proposal PKK dengan data lembaga yang mengajukan proposal PKW sebelum dilaksanakan penetapan lembaga penyelenggara program PKK untuk menghindari duplikasi. Selain itu mengembangkan sistem data bantuan pemerintah yang terintegrasi.
- f. Memberikan data lembaga-lembaga yang sudah selesai menyelenggarakan program PKK ke LSK melalui Subdit Kurikulum untuk dijadwalkan pelaksanaan uji kompetensinya.
- g. Mendorong lembaga penyelenggara program PKK untuk memperbaharui dan melengkapi data-data penyaluran kerja ke DUDI peserta didiknya dan segera menyampaikan datanya ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

## **2. Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan/Berwirausaha**

Realisasi dari IKK ini adalah 47.365 orang (52,63%) dari target renstra sebanyak 90.000 orang peserta didik, terdiri dari 46.914 orang realisasi PKW dan 451 orang realisasi PKW Unggulan (PKWU). Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 47.000 orang maka realisasi IKK ini melampaui target sebesar 100,78%. Penghitungan angka capaian ini belum termasuk jumlah peserta didik yang belajar vokasi secara mandiri dengan tujuan untuk berwirausaha serta yang mendapatkan program sejenis baik dari APBD I, APBD II dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.



Perealisasi IKK yang melebihi target dimungkinkan karena jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya untuk program PKW Unggulan sebesar Rp. 10.000.000 per peserta didik tidak seluruhnya diberikan sebesar Rp. 10.000.000., akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran sesuai jenis keterampilan. Kelebihan anggaran tersebut kemudian dialihkan kepada peserta didik program PKW sehingga jumlah peserta didiknya melebihi target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 47.000 orang.

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) atau satuan PNF lainnya, Organisasi mitra kursus dan asosiasi profesi, DUDI, serta lembaga pendidikan yang melaksanakan fungsi vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Program tersebut serupa dengan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan selama kurun waktu 2010 - 2015.



Gambar 5. Pembelajaran Program PKW Bidang Teknisi Kendaraan Bermotor Roda 2

Untuk mengoptimalkan *outcome* program tersebut, lembaga yang menyelenggarakan program PKW ini harus menggunakan metode 4 in 1, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Peluang Usaha

- 1) Lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi peluang usaha, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional, khususnya dalam konteks menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- 2) Lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi potensi sumber daya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai dengan peluang pasar pada skala lokal, nasional maupun internasional yang ada;

Apabila hasil identifikasi peluang usaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga dan jelas peluang usahanya, maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan menjadi program PKW.

- b. Pembelajaran Kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha

Proses pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan dalam Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dilaksanakan sesuai dengan peluang usaha hasil identifikasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran program PKW diperlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup: 1) Perubahan pola pikir; 2) Membangun karakter pengusaha; 3) Memulai usaha; 4) Merencanakan usaha; 5) Memasarkan dan mengembangkan usaha; dan f) Kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi peluang usaha.

- c. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik.

- d. Pendampingan dan Perintisan Usaha

Peserta didik yang telah mengikuti evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan bimbingan untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai. Lembaga juga melakukan pendampingan untuk memfasilitasi dalam mengakses dana kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, pemagangan usaha dan lain sebagainya.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu seperti warga masyarakat menganggur dan/atau belum memiliki pekerjaan tetap, putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), berusia 16-40 tahun, direkrut khusus (kelas khusus) pada lembaga kursus penyelenggara PKW, harus dipisahkan dengan peserta didik reguler (swadaya) pada lembaga penyelenggara PKW, serta tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pemberian bantuan pemerintah program PKW ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya penyusunan petunjuk teknis dan bantuan PKW, penilaian proposal PKW, pemberian bantuan PKW, orientasi teknis penyelenggaraan PKW, manajemen pengelolaan dana bantuan PKW, dan penyusunan standar biaya bantuan pemerintah.. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi tentang program pelaksanaan program PKW, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan standar biaya penyelenggaraan kursus dan pelatihan untuk masing-masing jenis keterampilan.. Satuan biaya kursus dan pelatihan untuk program PKW yang ditetapkan dalam sistem penganggaran di direktorat pembinaan kursus dan pelatihan dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dibutuhkan masukan dari para ahli, praktisi, maupun akademisi di bidang kursus dan keterampilan dalam menetapkan standar biaya penyelenggaraan kursus dan pelatihan.

Orientasi teknis Program PKW dilakukan di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Untuk tingkat pusat maupun tingkat provinsi, efisiensi dilakukan dalam hal penggunaan anggaran. Pelaksanaan orientasi teknis Program PKW tingkat pusat dilaksanakan sebanyak 6 (enam) tahap sesuai target yang ditetapkan. Sedangkan di tingkat provinsi, efisiensi anggaran dilakukan dalam bentuk pembagian/kombinasi tim teknis dan tim keuangan untuk melaksanakan orientasi teknis Program PKW di beberapa provinsi secara paralel (pada waktu yang bersamaan) dengan mempertimbangkan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki.

Pelaksanaan program PKW ini disalurkan melalui Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan), namun proses seleksi tidak hanya dilakukan di Pusat namun

juga dilakukan PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas yang merupakan UPT Ditjen PAUD dan Dikmas di 29 provinsi, sedangkan seleksi PKWU dilaksanakan di Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan). Berikut adalah tabel realisasi PKW di tingkat provinsi dan pusat:

Tabel 11. Jumlah Realisasi Program PKW Tahun 2018

NO	PROVINSI	PKW			PKWU		
		LMBG	PD	DANA (Rp 000)	LMBG	PD	DANA (Rp 000)
1	Aceh	82	1,740	4,802,400			
2	Bali	23	610	1,683,600			
3	Bangka Belitung	1	20	55,200			
4	Banten	86	2,110	5,823,600	1	30	225,000
5	Bengkulu	25	570	1,573,200			
6	DI Yogyakarta	39	955	2,635,800	1	30	300,000
7	DKI Jakarta	35	960	2,649,600			
8	Gorontalo	30	665	1,835,400			
9	Jambi	41	890	2,456,400			
10	Jawa Barat	323	7,835	21,624,600	6	139	1,220,000
11	Jawa Tengah	133	3,645	10,060,200	4	102	957,500
12	Jawa Timur	239	5,869	16,198,440	3	55	412,500
13	Kalimantan Barat	24	495	1,366,200			
14	Kalimantan Selatan	31	765	2,111,400	1	30	225,000
15	Kalimantan Tengah	15	345	952,200			
16	Kalimantan Timur	51	1,235	3,408,600	1	20	200,000
17	Kalimantan Utara	12	250	690,000			
18	Kepulauan Riau	4	115	317,400			
19	Lampung	78	1,820	5,023,200			
20	Maluku	25	555	1,531,800			
21	Maluku Utara	31	655	1,807,800			
22	Nusa Tenggara Barat	103	2,385	6,582,600	1	10	75,000
23	Nusa Tenggara Timur	25	595	1,642,200			
24	Papua	13	295	814,200			
25	Riau	55	1,315	3,629,400	1	20	150,000
26	Sulawesi Barat	29	600	1,656,000			
27	Sulawesi Selatan	68	1,710	4,719,600	1	15	90,000
28	Sulawesi Tengah	61	1,610	4,443,600			
29	Sulawesi Tenggara	39	910	2,511,600			
30	Sulawesi Utara	35	770	2,125,200			
31	Sumatera Barat	62	1,365	3,767,400			
32	Sumatera Selatan	36	975	2,691,000			
33	Sumatera Utara	99	2,280	6,292,800			
<b>TOTAL</b>		<b>1,953</b>	<b>46,914</b>	<b>129,482,640</b>	<b>20</b>	<b>451</b>	<b>3,855,000</b>

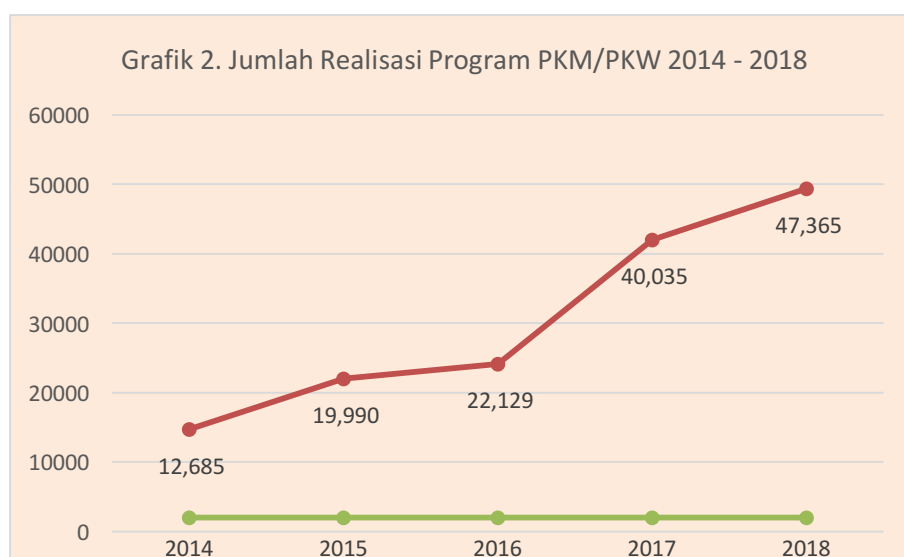
Ketercapaian IKK ini dilihat hanya didukung satu output, yaitu: Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha. Berikut tingkat ketercapaian output

Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/berwirausaha:

Tabel 12. Capaian IKK 2 Tahun 2017-2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kewirausahaan/berwirausaha	Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha	40.000 Orang	40.035 Orang	100,03%	47.000	47.365 Orang	100,78%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa output Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha/berwirausaha” jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan di tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,69%. Hal tersebut seiring dengan peningkatan jumlah sasaran yang sebelumnya ditargetkan sebesar 40.000 orang di tahun 2017 menjadi 47.000 orang di tahun 2018. Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2019 sebesar 280.000 orang peserta didik, maka sampai dengan tahun 2018 baru tercapai sebanyak 129.519 orang peserta didik atau 46,26%. Berikut adalah grafik realisasi IKK tersebut selama 5 tahun terakhir:



Walaupun kinerja telah mencapai bahkan melebihi target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses penetapan petunjuk teknis program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Perdirjen PAUD dan Dikmas) yang lama menyebabkan proses penilaian proposal, verifikasi lapangan, dan penetapan lembaga penerima dana terlambat dilaksanakan.
- b. Masih banyak lembaga yang terakreditasi C dan lembaga yang belum terakreditasi mengirimkan proposalnya ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang seharusnya sesuai petunjuk teknis program PKK, proposal dari lembaga tersebut dikirim ke Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP PAUD dan Dikmas) di setiap Provinsi, hal tersebut menyebabkan proposal yang diterima oleh PP/BP PAUD dan Dikmas kurang sehingga pelaksanaan penilaian proposal dan verifikasi lapangan terlambat dilaksanakan.
- c. Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan dari PP/BP PAUD dan Dikmas yang terlambat tersebut (point b), menyebabkan terlambatnya penetapan lembaga penyelenggara program PKW, sehingga pelaksanaan program PKW di lembaga terlambat dilaksanakan bahkan bisa melewati tahun anggaran 2018.
- d. Belum terintegrasinya data-data lembaga yang mengajukan proposal bantuan pemerintah khususnya program PKW dan program PKK pada tahun berjalan (2018), hal ini seringkali menyebabkan terjadinya duplikasi pada proses penetapan lembaga penerima dana bantuan program PKK dan program PKW.
- e. Proses pendampingan oleh lembaga setelah selesai pembelajaran belum terdata secara baik dan sistematis.
- f. Pada penetapan lembaga penerima dana bantuan PKW di bulan September terjadi kemunduran disebabkan adanya kebijakan untuk mengalihkan sisa dana bantuan kepada daerah bencana di Palu. Hal tersebut diiringi dengan sulitnya mendata lembaga yang sudah mendapatkan dana bantuan PKW dan belum mendapatkan.
- g. Pada pelaksanaan pembelajaran di beberapa lembaga terjadi kemunduran dari jadwal semula disebabkan banyak lembaga penerima dana bantuan yang belum

menginput data pada aplikasi DAPODIK sebagaimana dipersyaratkan di dalam petunjuk teknis program PKW.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- h. Penyusunan petunjuk teknis program PKW harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran sebelumnya sehingga pada awal bulan Januari pada tahun anggaran baru petunjuk teknis tersebut bisa ditetapkan menjadi Perdirjen PAUD dan Dikmas.
- i. Memanfaatkan agenda rapat koordinasi dengan para *stake holder* seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, PP/BP PAUD dan Dikmas, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), Organisasi Mitra, Yayasan, Instansi/Lembaga Pendidikan Vokasi, Lembaga Penyelenggara Kursus, untuk mensosialisasikan program bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan khususnya program PKW.
- j. Selain sosialisasi pada agenda rapat koordinasi (point b), sosialisasi program PKW dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu; portal resmi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan saluran media sosial seperti; *whats up group*, *facebook*, *youtube* dan lain sebagainya.
- k. Proposal dari lembaga yang terakreditasi C dan lembaga yang belum terakreditasi yang dikirim ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (pusat) sementara tetap dinilai oleh tim penilai pusat dengan tetap memberikan informasi terkait proposal dari lembaga-lembaga tersebut ke PP/BP PAUD dan Dikmas yang bersangkutan. Pada tahun anggaran berikutnya apabila ada proposal dari lembaga yang terakreditasi C dan lembaga yang belum terakreditasi dikirim ke pusat maka secara bertahap akan dikembalikan ke PP/BP PAUD dan Dikmas yang bersangkutan untuk dinilai.
- l. Melakukan *cross check* data lembaga yang mengajukan proposal PKK dengan data lembaga yang mengajukan proposal PKW sebelum dilaksanakan penetapan lembaga penyelenggara program PKK untuk menghindari duplikasi. Selain itu mengembangkan sistem data bantuan pemerintah yang terintegrasi.

- m. Mensosialisasikan kembali urgensi dan tata cara penginputan data pada aplikasi DAPODIK pada setiap agenda rapat, pertemuan maupun pada saat orientasi teknis.
- n. Mendorong lembaga penyelenggara program PKW agar melakukan pencatatan secara sistematis terkait pelaksanaan pendampingan program PKW setelah pembelajaran selesai dilaksanakan.

### **3. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Rujukan**

Realisasi dari IKK ini adalah 168 lembaga (840%) dari target renstra sebanyak 20 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 100 lembaga maka realisasi IKK ini adalah sebesar 168%.

Perealisasi IKK yang melebihi target dimungkinkan karena IKK ini awalnya diperuntukkan untuk membuat *centre of excellent* atau pusat kursus dan pelatihan rujukan yang ada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan hasil analisis potensi vokasi yang dominan untuk dikembangkan. Seiring dengan perubahan arah kebijakan dan anggaran di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka desain dari IKK ini diperuntukkan untuk memberikan bantuan sarana praktik kursus kepada LKP dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi lembaga dan menyesuaikan dengan tuntutan DUDI. Hal inilah yang menyebabkan jumlah realisasi menjadi bertambah besar yang tersebar di banyak kabupaten/kota. IKK ini juga menjadi target Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk diusulkan kedalam perubahan renstra.

Program bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan merupakan program pembinaan kepada LKP melalui penambahan kuantitas dan kualitas sarana praktik untuk meningkatkan mutu pembelajaran praktik kursus dan pelatihan serta selaras dengan kebutuhan DUDI. Sasaran program ini adalah LKP yang belum pernah menerima bantuan sarana dan prasarana dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun sebelumnya, memiliki ruangan untuk menempatkan sarana praktik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, memiliki pendidik/pamong belajar dengan bidang kompetensi sesuai sarana praktik yang diajukan (memiliki sertifikat kompetensi atau minimal ijazah DIII), serta memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) serta beroperasi sekurang-kurang 3 tahun (khusus LKP).



Pemberian bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan ini didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan dan finalisasi petunjuk teknis bantuan sarana dan prasarana, penilaian proposal dan verifikasi bantuan sarana dan prasarana, orientasi teknis penyelenggara bantuan sarana praktik kursus, pelatihan dan pendampingan teknis bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan.

Ketercapaian IKK ini diukur dari satu output saja yaitu lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan. Berikut tingkat ketercapaian output lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan:

Tabel 13. Capaian IKK 3 Tahun 2017-2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan	91 Lembaga	136 Lembaga	149,45%	100 Lembaga	168 Lembaga	168%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa output “Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan” jika dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan di tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 18,55%. Hal tersebut seiring dengan peningkatan jumlah sasaran yang sebelumnya ditargetkan sebesar 91 lembaga di tahun 2017 menjadi 100 lembaga di tahun 2018. Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2019 sebesar 75 lembaga, maka sampai dengan tahun 2018 telah tercapai sebanyak 304 lembaga atau 405,33%. Berikut adalah realisasi penerima bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan tahun 2018:

Tabel 14. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sarana Kursus dan Pelatihan Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan
1	Aceh	6
2	Banten	1
3	Bengkulu	1
4	DI Yogyakarta	3
5	Gorontalo	1
6	Jambi	5
7	Jawa Barat	26

No	Provinsi	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan
8	Jawa Tengah	18
9	Jawa Timur	18
10	Kalimantan Selatan	4
11	Kalimantan Tengah	3
12	Kalimantan Timur	3
13	Kalimantan Utara	2
14	Lampung	18
15	Nusa Tenggara Barat	11
16	Nusa Tenggara Timur	2
17	Papua	1
18	Riau	4
19	Sulawesi Selatan	17
20	Sulawesi Tengah	4
21	Sulawesi Tenggara	2
22	Sulawesi Utara	3
23	Sumatera Barat	4
24	Sumatera Selatan	3
25	Sumatera Utara	8
	Total	168

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan pada anggaran dengan menyesuaikan besar bantuan setiap lembaga dengan sarana praktik yang diperlukan berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi lapangan.



*Gambar 6. Bantuan Sarana Praktik Kursus Bidang Menjahit Garmen*

#### 4. Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan

Realisasi dari IKK ini adalah 79 naskah (197,50%) dari target renstra sebanyak 40 naskah. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 69 naskah maka realisasi IKK ini adalah sebesar 114,49%.

Perealisasi IKK yang melebihi target dimungkinkan karena diantara 69 naskah yang dihasilkan 16 naskah yang dihasilkan merupakan hasil akhir dari penyusunan yang telah dimulai sejak tahun 2017.

IKK jumlah standar program kursus dan pelatihan ini ditetapkan dalam rangka penjaminan mutu terhadap lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan amanah dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah menetapkan berbagai peraturan/regulasi dan program yang meliputi aspek legalitas, sertifikasi kompetensi, dan evaluasi, serta mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP), yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai salah satu penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat umum secara luas.

Selain itu, dalam rangka pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan untuk penjaminan mutu (*quality assurance*), telah disusun beberapa standar yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya meliputi standar isi, kompetensi lulusan, pengelolaan, penilaian dan sarana prasarana. Kemudian dengan melihat bahwa semakin dekatnya persaingan pasar global, tuntutan terhadap LKP dalam menghasilkan peserta didik yang kompetitif dan berdaya saing akan semakin meningkat.

Secara umum tahapan penyusunan standar dimulai dengan penyusunan draft, review, validasi, dan finalisasi. Tahap validasi akan melibatkan Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tim penyusun standar-standar ini terdiri dari akademisi dan praktisi baik dari kalangan perguruan tinggi, asosiasi profesi, konsorsium maupun organisasi mitra kursus dan pelatihan

Standarisasi lembaga kursus dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para penyelenggara kursus dan pelatihan agar memiliki standar dan mutu kelembagaan yang berdaya saing nasional atau internasional.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu norma standar prosedur dan kriteria kursus.. Berikut tingkat ketercapaian IKK Jumlah standar program kursus dan pelatihan:

Tabel 15. Capaian IKK 4 Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Standar program kursus dan pelatihan	Norma, standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan	32 Naskah	37 Naskah	115,63%	69 Naskah	79 Naskah	114,49%

Berdasarkan data di atas dapat terlihat adanya penurunan persentase realisasi di tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2017 sebesar 1,14%.. Hal tersebut seiring dengan adanya peningkatan target sasaran sebanyak 37 naskah atau 53,62%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebanyak 172 naskah standar, maka telah terealisasi sebanyak 150 Naskah atau 87,21%.

Pada tahun 2018, pada output Norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan target 69 naskah standar yang terdiri dari standar kompetensi lulusan sebanyak 3 naskah, kurikulum berbasis kompetensi sebanyak 19 naskah, standar sarana dan prasarana sebanyak 5 naskah, standar pengelolaan sebanyak 1 naskah, bahan ajar audio visual sebanyak 40 naskah, bahan ajar cetak sebanyak 1 naskah. Realisasi output Norma standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Penyusunan dan Finalisasi Standar Kompetensi Lulusan

Pada tahun 2018, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan penyusunan standar kompetensi lulusan untuk 3 bidang keterampilan baru yaitu: pemasaran digital (*digital marketing*), robotika, dan pengembangan gim (*game development*) serta *upgrade* 1 bidang keterampilan yaitu teknik sepeda motor jenjang III. Pemilihan 3 jenis keterampilan baru ini mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan dunia industri menyongsong revolusi industri

4.0. Penyusunan SKL tersebut mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), terdapat 5 jenjang SKL berbasis KKNI yang disusun dari 3 bidang keterampilan baru tersebut, yaitu Pemasaran Digital (*Digital Marketing*) jenjang III dan jenjang IV, Robotika jenjang III, serta Pengembangan Gim (*Game Development*) jenjang II dan jenjang III.

Proses penyusunan SKL tersebut melalui 4 tahapan, yaitu a) Penyusunan draf SKL, b) Review/penelaahan SKL, c) Validasi SKL, dan d) Finalisasi SKL. Tahapan review/penelaahan melibatkan reviewer dari praktisi, akademisi, penyelenggara kursus dan dunia usaha/dunia industri bidang terkait untuk menelaah kompetensi yang disusun dari berbagai sisi. Tahapan validasi melibatkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk memastikan kesesuaian SKL dengan kriteria penentuan standar yang ditetapkan. Sedangkan tahapan finalisasi melibatkan Biro Hukum dan Organisasi untuk menindaklanjuti rekomendasi BSNP dalam rangka pengusulan draf SKL ditetapkan menjadi Permendikbud.

b. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum merupakan acuan bagi lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan dalam melaksanakan proses pembelajaran, berisi profil lulusan, capaian pembelajaran (kompetensi), bahan kajian dan rencana pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Penyusunan KBK mengacu kepada SKL berbasis KKNI. Prosedur penyusunan KBK terdiri dari 5 tahap yaitu: a) Penyusunan draf KBK, b) Review KBK, c) Validasi KBK, dan e) Finalisasi KBK.



Gambar 7. Review Standar Kompetensi Lulusan melibatkan Pakar Praktisi dan Akademisi terkait

Pada tahun 2018, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan review kurikulum untuk 16 bidang keterampilan yang disusun tahun 2017 sebagai berikut: a)Telepon Selular, b) Elektronika Industri Pengendali Logika, c) Perakitan Pipa Bahan Logam, d) Operator Alat Berat, e) Pijat Akupresur, f) Penyutradaraan Televisi, g) Penyiaran Radio, h) Tari Tradisional, i) Multimedia, j) Keamanan Komputer, k) Jurnalistik, l) Tata Operasi Darat (*Ground handling*), m) Awak Kabin Pesawat Udara, n) Desain Interior , o) Bahasa Inggris untuk Pegawai Kesehatan, dan p) Pijat Urut Tradisional. Berikut ini adalah daftar kurikulum berbasis kompetensi yang direviu di tahun 2018:

Tabel 16. Daftar Kurikulum Berbasis Kompetensi yang direviu Tahun 2018

NO.	NAMA SKL	JENJANG KKNI	Profil Lulusan / Jabatan Kerja	KURIKULUM	
				JUMLAH JAM PELAJARAN	JUMLAH MODUL
1	Telepon Selular	Jenjang III	Pereparasi Telepon Selular sesuai jenjang III	150 jam	11
		Jenjang IV	Pereparasi Telepon Selular sesuai jenjang IV	150 jam	13
2	Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram (PLT) / Programmable Logic Controller (PLC)	Jenjang III	Operator PLT	200 jam	6
		Jenjang IV	Teknisi PLT	240 jam	*)
3	Perakitan Pipa Bahan Logam	Jenjang III	Perakit pipa bahan logam pemula	200 jam	5
4	Operator Alat Berat Tingkat Pemula	Jenjang II	Operator Alat Berat Tingkat Pemula	240 jam	10
5	Akupresur	Jenjang II	Asisten Akupresur	96 jam	6
		Jenjang IV	Akupresuris	276 jam	6
6	Penyutradaraan Televisi	Jenjang IV	Floor Director, Asisten Sutradara atau calon Sutradara	320 jam	14
7	Penyiaran Radio	Jenjang III	Penyiar Radio atau presenter atau pembawa acara atau pembaca berita atau radio jockey	150 jam	8
8	Tari Tradisional	Jenjang IV	Instruktur Tari Tradisional	*)	*)
9	Multimedia	Jenjang IV	Pelaksana Produksi Multimedia	163 jam	10

NO.	NAMA SKL	JENJANG KKNI	Profil Lulusan / Jabatan Kerja	KURIKULUM	
				JUMLAH JAM PELAJARAN	JUMLAH MODUL
10	Keamanan Komputer	Jenjang VI	Teknisi Junior	153 jam	14
11	Jurnalistik	Jenjang III	Wartawan/Jurnalis	339 jam	12
12	Tata Operasi Darat (Groundhandling)	Jenjang III	Staf Tata Operasi Darat (Ground Handling) /Staf Penerbangan (airline staff) pemula	180 jam	*)
13	Awak Kabin Pesawat Udara	Jenjang III	awak kabin tingkat junior berstandar Internasional	300 jam	27
14	Desain Interior Tingkat Pemula	Jenjang III	asisten desainer interior pemula (drafter interior, 3D artist interior, penata warna & bahan (material & colour scheme), estimator, administrator manajemen proyek interior dan supervisor interior)	339 jam	9
15	Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan	-	Mengikuti jabatan pada Kursus dan Pelatihan Pekarya Kesehatan	80 jam	5
16	Pijat Urut Tradisional	Jenjang III, Perawatan Wanita dan Bayi Tingkat Pemula	Pemijat Tradisional Perawatan Wanita dan Bayi	200 jam	*)
		Jenjang III, Kebugaran dan Relaksasi	Pemijat Tradisional Kebugaran	200 jam	9

Reviu SKL untuk 16 jenis keterampilan ini dilaksanakan di tahun 2018 dikarenakan adanya pemotongan anggaran di tahun 2017 sehingga menyebabkan terjadinya kemunduran penyelesaian naskah kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2017.

Selain review terhadap kurikulum tahun sebelumnya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga melakukan penyusunan hingga finalisasi kurikulum berbasis kompetensi untuk 4 bidang keterampilan sebagaimana SKL yang telah disusun yaitu: Pemasaran Digital (*Digital Marketing*) jenjang III dan jenjang IV, Robotika jenjang III, serta Pengembangan Gim (*Game Development*) jenjang II dan jenjang III, serta Teknik Sepeda Motor jenjang III.

c. Penyusunan standar sarana dan prasarana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 48 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dinyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Di antara norma yang ditetapkan tersebut adalah norma sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana lembaga pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan proses dan menghasilkan *output*, serta *outcome* pembelajaran yang berkualitas. Pentingnya faktor sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran dipertegas oleh semakin berkembangnya teknologi pada peralatan-peralatan yang digunakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Kemajuan peralatan menuntut kompetensi sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengoperasikan, dan bahkan mengembangkan teknologi tersebut.

Dengan perkembangan DUDI yang semakin cepat, LKP sebagai salah satu pemasok SDM harus mampu mengimbangi percepatan itu dengan menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan sesuai persyaratan DUDI. Ketertinggalan dan keterlambatan dalam menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar akan menjadikan LKP sebagai lembaga pendidikan kelas tiga yang tidak menarik dan ditinggalkan, baik oleh calon peserta didik sebagai sumber pasokan, maupun oleh DUDI sebagai pengguna pasokan SDM.

Dalam rangka membentuk, mengarahkan, dan membina LKP yang mampu bersaing dalam era global, baik kemampuan dalam mengelola lembaga, menciptakan proses pembelajaran yang baik, dan mendidik lulusan yang mudah



diserap DUDI, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memandang perlu adanya standar sarana dan prasarana LKP agar dapat memenuhi tantangan-tantangan yang dipersyaratkan oleh DUDI dan era global di masa mendatang. Mekanisme yang dilakukan untuk merealisasikan hal ini melalui beberapa tahap, yaitu: 1) Review draft standar, 2) Validasi draft standar; 3) Uji publik draft standar; 4) Penelaahan draft standar oleh BSNP; 5) Finalisasi draft standar menjadi standar; 6) Pleno BSNP; 7) Pengajuan draft standar menjadi Permendikbud.



*Gambar 8. Review Standar Sarana dan Prasarana bersama praktisi terkait*

Sebagai respon terhadap perkembangan dunia usaha dan dunia industri, telah dilakukan perubahan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), perubahan SKL tersebut secara otomatis mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana kursus dan pelatihan. Pada tahun 2018 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan review standar sarana prasarana kursus dan pelatihan untuk 5 (lima) jenis keterampilan yang telah ada sebelumnya yaitu jenis keterampilan Tata Busana, Spa, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rambut, Otomotif Sepeda Motor dan Desain Grafis. Di samping itu juga telah menyelesaikan 5 (lima) naskah draft awal standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan yaitu Desain Interior, Ground Handling, Mobile Application Programming, Operator Alat Berat, dan Pramugari. Kelima draft awal standar sarana ini selanjutnya akan difinalkan setelah draft standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan yang disusun oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) yang saat ini masih dalam proses, disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia (Permendikbud).

Tabel 17. Daftar Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan

No	Program	Tahun Penyusunan	Keterangan
1	Tata kecantikan kulit	2011	Telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014
2	Spa		
3	Tata busana	2012	
4	Mekanik sepeda motor		
5	Baby sitter	2013	
6	Mengemudi kendaraan bermotor		
7	Perhotelan	2014	
8	Tata kecantikan rambut		
9	Tata rias pengantin		
10	Tata boga		
11	Bahasa	2015	Telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016
12	Fotografi		
13	Merangkai bunga kering & bunga buatan		
14	Pijat pengobatan refleksi		
15	Teknisi Akuntansi		
16	Animasi	2016	Telah ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2017
17	Pekarya kesehatan		
18	Komputer jaringan		
19	Teknisi komputer		
20	Las		
21	Pendidik PAUD	2016	Penyusunan 2016, Review-Finalisasi 2017, Proses pengajuan penerbitan Permendikbud
22	Bordir dan sulam		
23	Otomotif mobil (teknik kendaraan ringan)		
24	Desain grafis		
25	Tari tradisonal		
26	Web design		
27	Web Programming		
28	CAD		
29	Membatik		
30	Plumbing		

d. Penyusunan standar pengelolaan

Standar pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan disusun dalam 6 katagori kegiatan yaitu: a). Reviu Standar Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, b). Penyusunan Petunjuk Teknis Perijinan Kursus Online, c). Finalisasi Panduan Penguatan Pendidikan Karakter pada Lembaga Kursus dan Pelatihan, d).

Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter pada LKP, e). Orientasi Teknis Standar Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, f). Penyusunan Bahan Sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter pada LKP.

Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 1 naskah standar pengelolaan, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 13 naskah, yaitu 1 naskah Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Online, 6 naskah videografis bahan sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter pada LKP (PPK-LKP), 1 naskah Panduan PPK-LKP, 4 naskah modul bimbingan teknis PPK-LKP, dan 1 naskah Petunjuk Teknis Kemitraan, dengan persentase capaian sebesar 1300%.

Realisasi sesuai target/melebihi target tersebut dimungkinkan karena ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan standar pengelolaan batal dilaksanakan karena menunggu penyelesaian Standar Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sedang dibuat oleh BSNP.

Walaupun target kinerja telah tercapai, bahkan melebihi target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan, yaitu susunan anggaran tidak sesuai.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah penyesuaian anggaran dengan kebutuhan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%, dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 1300%, maka pada tahun 2018 terdapat peningkatan/penurunan capaian kinerja sebesar 1200%, hal ini disebabkan pengalihan sasaran yang semula adalah penyusunan standar pengelolaan menjadi petunjuk teknis/panduan/bahan sosialisasi/modul yang dibutuhkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai bentuk pembinaan kepada LKP pada saat ini.

e. Penyusunan bahan ajar audio visual

Penyusunan bahan ajar kursus dan pelatihan dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran di lembaga kursus atau satuan pendidikan nonfomal lainnya agar lebih riil dan memudahkan peserta didik untuk mempraktikkannya.

Bahan ajar yang disusun ada 2 jenis, yaitu dalam bentuk audio visual dan bahan ajar cetak. Penyusunan bahan ajar audio visual dilakukan dengan tahapan: penyusunan

naskah dan sinopsis substansi, finalisasi naskah dan sinopsis substansi, produksi dan review hasil produksi bahan ajar dalam bentuk audio visual.

Pada tahun 2018 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan penyusunan untuk 2 format bahan ajar audio visual yaitu format video *success story* dan dalam format materi pembelajaran kursus dalam jaring (Daring). Untuk jenis keterampilan yang disusun dalam format video *success story* peserta didik yaitu ada 5 (lima) jenis keterampilan diantaranya adalah: tata kecantikan, teknisi sepeda motor, desain grafis, teknisi garmen, dan perhotelan. Sementara untuk jenis keterampilan yang dibuat dalam format video pembelajaran yaitu ada 4 (empat) jenis, diantaranya adalah: bahasa korea, bahasa inggris, digital marketing, tata kecantikan kulit. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bekerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan terkait dalam menyusun desain materi video maupun dalam proses editing pada hasil akhirnya. Berikut ini adalah daftar jenis keterampilan yang dilakukan penyusunan materi bahan ajar audio visual:

Tabel 18. Bahan Ajar Audio Visual yang disusun Tahun 2018

No	Jenis Keterampilan	Mitra Penyusunan Bahan Ajar Audio Visual
<i>Format Video Success Story</i>		
1	Tata Kecantikan	LKP H. July
2	Teknisi Sepeda Motor	LKP Mustika Wangi
3	Desain Grafis	LKP Piksi Megatama
4	Teknisi Garmen	LPK Karika
5	Perhotelan	IHS
<i>Format Video Materi Pembelajaran Kursus Daring</i>		
1	Bahasa Korea	LKP Bina Insani
2	Bahasa Inggris	LKP Gazebo
3	Digital Marketing	LKP I-Tech
4	Tata Kecantikan Kulit	LKP Mahardika

f. Penyusunan bahan ajar cetak

Pada tahun 2018, Direktorat melakukan pencetakan 8 judul bahan ajar cetak yang telah disusun sebelumnya di tahun 2017. Diantara 8 judul tersebut yaitu:

Tabel 19. Bahan Ajar Cetak yang dicetak Tahun 2018

No.	Judul	Jenis Keterampilan
1	Persiapan pada pekerjaan plambing	Plambing
2	Pemasangan, Perawatan dan perbaikan Air Conditioner	Teknisi AC

3	Menjadi Pramuwisata yang Kompeten	Pramuwisata
4	Desain Antar Muka Web	Web Desainer
5	Tune Up Motor Otto	Otomotif Mobil
6	Pengantar Komputer Desain Grafis	Desain Grafis
7	Kreasi Batik dengan Pewarna Sintetis	Membatik
8	Pemrograman Web Dasar	Web Programming

## 5. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan/Mitra yang Memperoleh Bantuan Penguatan Kelembagaan

Realisasi dari IKK ini adalah 832 Lembaga (92,44%) dari target renstra sebanyak 900 Lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 794 Lembaga maka realisasi IKK ini adalah sebesar 104,79%.

IKK jumlah lembaga kursus/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan ini ditetapkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan serta penguatan kemitraan dalam bentuk koordinasi dan pemberian bantuan kemitraan baik dengan asosiasi profesi, organisasi mitra, konsorsium, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten), serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Berikut ini adalah ketercapaian IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan :

Tabel 20. Capaian IKK 5 Tahun 2017-2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional	142 Lembaga	131 Lembaga	92,5%	-	-	-
	Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	612 Lembaga	601 Lembaga	98,20%	-	-	-
	Layanan Internal (overhead)	27 Lembaga	27 Lembaga	100%	-	-	-
	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan	-	-	-	794 Lembaga	832 Lembaga	104,79%

Ketercapaian IKK ini didukung satu output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Penguatan yang perealisasiannya didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi memperoleh peningkatan kapasitas

Dalam rangka meningkatkan kapasitas LSK perlu dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja terhadap LSK dan bimbingan teknis. Penilaian kinerja LSK dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: penilaian dokumen, penilaian observasi, pengolahan data hasil penilaian, analisis hasil pengolahan data, dan penetapan nilai kinerja LSK. Tahun 2018 LSK yang siap dinilai kinerjanya ditargetkan sebanyak 37 lembaga, akan tetapi dikarenakan terdapat 2 LSK yang sudah tidak aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi sehingga target berubah menjadi sebanyak 35 LSK. Berikut ini 3 (tiga) LSK yang mendapatkan predikat terbaik ditahun 2018:

Tabel 21. LSK Berpredikat Terbaik Tahun 2018

No	Nama LSK	Skor				Total	%
		Dokumentasi	Kuesioner	Observasi LSK	Observasi UJK		
e 1	LSK Kecantikan	84,85	95,91	100	94,32	375,08	93,77
l 2	LSK Hantaran	77,58	88,39	100	95,45	361,42	90,35
a 3	LSK SPA	85,85	94,37	83,64	88,64	352,5	88,12

Sampai dengan akhir tahun 2018, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah memfasilitasi pembentukan 37 LSK: (1) Akupunktur, (2) Bahasa Inggris, (3) Bahasa Mandarin, (4) Bordir dan sulam, (5) Broadcasting (penyiaran televisi, kamerawan TV dan video editing), (6) Elektronika (elektronika dasar dan teknisi AC), (7) Ekspor impor, (8) Fotografi, (9) Hantaran, (10) Hubungan masyarakat, (11) Master of Ceremony, (12) Mengemudi Kendaraan Bermotor, (13) Merangkai bunga kering dan bunga buatan, (14) Musik, (15) Pekarya kesehatan, (16) Pendidik PAUD, (17) Pengasuh bayi dan anak, (18) Pengobat tradisional (battra) ramuan, (19) Perhotelan, (20) Perpajakan, (21) Pijat refleksi, (22) Sekretaris, (23) Senam, (24) Seni merangkai bunga dan desain floral, (25) Sinshe, (26) Spa, (27) Tata boga (jasa usaha makanan dan pastry-bakery), (28) Tata busana, (29) Tata

Kecantikan (tata kecantikan rambut dan tata kecantikan kulit), (30) Tata rias pengantin, (31) Teknologi dan Informasi Komunikasi (komputer aplikasi perkantoran, desain grafis, teknisi komputer dan komputer jaringan), (32) Teknisi Akuntansi, (33) Teknik sepeda motor, (34) Teknik kendaraan ringan, (35) LSK bidang Membatik, (36) Pijat urut tradisional dan (37) Pijat akupresur. Dari 37 LSK yang telah terbentuk, sebanyak 2 LSK dibekukan karena pasif dalam penyelenggaraan uji kompetensi yaitu LSK bidang Hubungan Masyarakat dan Perhotelan. Peserta kegiatan ini adalah Ketua LSK dan Ketua Bidang Pengujian, yang berasal dari 35 LSK yang aktif.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Layanan Pembelajaran dan Penilaian Lembaga Sertifikasi Kompetensi tahun 2018 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan LSK sehingga nantinya LSK menjadi lembaga yang kredibel/terpercaya.
  2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola penyelenggaraan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSK, pendaftaran peserta ujian, pelaksanaan ujian dan sertifikasi hasil uji kompetensi.
  3. Meningkatkan pengetahuan pengurus LSK dibidang penyusunan laporan bantuan pemerintah.
  4. Meningkatkan kemampuan LSK dalam mempersiapkan soal uji kompetensi.
- 2) Bantuan Pembinaan Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan

Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 25 lembaga, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 26 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 104%.

Realisasi melebihi target tersebut dimungkinkan karena pemberian bantuan tidak diberikan secara merata kepada setiap lembaga penerima, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan rasionalitas anggaran yang diajukan, sehingga jumlah lembaga penerima dimungkinkan lebih banyak dari target semula.

Walaupun target kinerja telah tercapai, bahkan melebihi target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan seperti pemberian bantuan kepada lembaga dalam rangka tanggap bencana Palu.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan menyusun petunjuk teknis untuk pemberian BP-Ormit dalam rangka tanggap bencana.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 95%, dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 104%, maka pada tahun 2018 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 9%, hal ini disebabkan oleh lembaga/organisasi yang memahami perubahan petunjuk teknis pemberian BP-Ormit pada tahun 2017 masih sedikit dibandingkan dengan pada tahun 2018.

### 3) Koordinasi Program Kursus dan Pelatihan dengan Instansi Terkait

Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 230 orang, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 245 orang, dengan persentase capaian sebesar 106,52%.

Realisasi melebihi target tersebut dimungkinkan karena terjadi efisiensi dalam biaya transportasi, misalnya harga tiket pesawat ternyata lebih kecil daripada yang diperkirakan, sehingga dapat mengundang peserta lebih banyak.

Walaupun target kinerja telah tercapai, bahkan melebihi target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan seperti harga tiket pesawat yang tidak stabil.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi/undangan kegiatan lebih awal
- b. Meminta konfirmasi kehadiran serta harga tiket pesawat kepada peserta sebelum kegiatan dilaksanakan

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%, dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 106,52%, maka pada tahun 2018 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 6,52%, hal ini disebabkan oleh peserta pada tahun 2017 kebanyakan merupakan peserta lokal atau berasal dari sekitar kota Jakarta, sementara peserta pada tahun 2018 melibatkan beberapa peserta dari luar kota Jakarta.

### 4) Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional



Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 30 lembaga pemenang lomba, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 30 lembaga orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kegiatan lomba dilaksanakan pada 5 rumpun jenis keterampilan yaitu kerumahtanggaan, kesehatan, jasa, teknis dan bahasa. Masing-masing jenis keterampilan terdapat 6 lembaga pemenang.

Melalui pelaksanaan program ini diharapkan adanya lembaga-lembaga berprestasi baik di forum nasional maupun internasional yang benar benar terpercaya dan berkualitas dari masing masing kategori. Melalui pelaksanaan apresiasi ini juga diharapkan adanya peningkatan daya saing lembaga sekaligus mampu mereduksi perbedaan kualitas dan kuantitas antara lembaga kursus dan

pelatihan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Sehingga pada akhirnya akan tampak adanya sejumlah LKP yang berkinerja lebih baik.



Gambar 9. Lomba LKP Berprestasi Nasional Tahun 2018

Program ini didukung dengan kegiatan: i) Penilaian Proposal Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional, ii) Verifikasi Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional, iii) Presentasi Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional, iv) Pemberian Anugerah Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional, v) Hadiah Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional. Berikut ini adalah daftar pemenang Lomba Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018:

Tabel 22. Pemenang Lomba LKP Berprestasi Tahun 2018

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA LEMBAGA	KAB/ KOTA-PROVINSI	JENIS KETERAMPILAN	DANA PEMBINAAN
<b>I. RUMPUN KERUMAHTANGGAAN</b>					
1	Pertama	LKP Budi Mulya Dua' Culinary School'	Kabupaten Sleman – D.I Yogyakarta	Tata Boga	Rp. 25.000.000
2	Kedua	LKP Gemilang	Kota Tasikmalaya – Jawa Barat	Tata Boga	Rp. 20.000.000
3	Ketiga	LKP Vita	Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah	Tata Busana	Rp. 15.000.000
4	Harapan Satu	LKP Sanita	Kabupaten Trenggalek – Jawa Timur	Tata Busana	Rp. 10.000.000
5	Harapan Dua	LKP BBEC	Kota Bontang – Kalimantan Timur	Tata Boga	Rp. 7.500.000
6	Harapan Tiga	YPKM Marina	Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah	Tata Busana	Rp. 5.000.000
<b>II. RUMPUN KESEHATAN</b>					
1	Pertama	LKP Amanah Husada	Kota Probolinggo – Jawa Timur	Asisten Keperawatan	Rp. 25.000.000
2	Kedua	LKP Unna	Kota Bandung – Jawa Barat	Tata Kecantikan Kulit	Rp. 20.000.000
3	Ketiga	LKP Rama	Kota Denpasar - Bali	Tata Kecantikan Rambut	Rp. 15.000.000
4	Harapan Satu	LKP Padmastana Training Center	Kota Denpasar - Bali	SPA	Rp. 10.000.000
5	Harapan Dua	LKP Shalma	Kabupaten Pati – Jawa Tengah	Tata Kecantikan Rambut	Rp. 7.500.000
6	Harapan Tiga	LKP John Van Tien	Kota Bogor – Jawa Barat	Tata Kecantikan Rambut	Rp. 5.000.000
<b>III. RUMPUN JASA</b>					
1	Pertama	LKP Solocom	Kota Surakarta – Jawa Tengah	Administrasi Perkantoran	Rp. 25.000.000
2	Kedua	LKP Neptune	Kota Kediri – Jawa Timur	Perhotelan	Rp. 20.000.000
3	Ketiga	LKP Duta Persada	Kota Yogyakarta – D.I Yogyakarta	Perhotelan	Rp. 15.000.000
4	Harapan Satu	LKP Dynasty Computer	Kota Bukittinggi – Sumatera Barat	Administrasi Perkantoran	Rp. 10.000.000
5	Harapan Dua	LKP Magistra Utama Yogyakarta	Kota Yogyakarta – D.I Yogyakarta	Administrasi Perkantoran	Rp. 7.500.000

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA LEMBAGA	KAB/ KOTA-PROVINSI	JENIS KETERAMPILAN	DANA PEMBINAAN
6	Harapan Tiga	LKP Terra Computer System Kediri	Kota Kediri – Jawa Timur	Desain Grafis	Rp. 5.000.000
<b>IV. RUMPUN TEKNIK</b>					
1	Pertama	LKP BPLE Tiara Course	Kota Denpasar - Bali	Engineering	Rp. 25.000.000
2	Kedua	LKP Widyaloka	Kota Bukittinggi – Sumatera Barat	Teknisi Komputer	Rp. 20.000.000
3	Ketiga	LKP Nissan Fortuna	Kabupaten Kudus – Jawa Tengah	Otomotif Sepeda Motor	Rp. 15.000.000
4	Harapan Satu	LKP Kharisma	Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan	Otomotif Sepeda Motor	Rp. 10.000.000
5	Harapan Dua	LKP Nolen Training Center	Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat	Otomotif Sepeda Motor	Rp. 7.500.000
6	Harapan Tiga	LKP Indomedia Data Komputer Yogyakarta	Kabupaten Sleman – D.I Yogyakarta	Teknisi Komputer	Rp. 5.000.000
<b>V. RUMPUN BAHASA</b>					
1	Pertama	LKP Wisma Bahasa	Kabupaten Sleman – D.I Yogyakarta	Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing	Rp. 25.000.000
2	Kedua	LKP Funtastic English Center	Kota Kendari – Sulawesi Tenggara	Bahasa Inggris	Rp. 20.000.000
3	Ketiga	LKP LIA Mercu Buana	Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta	Bahasa Inggris	Rp. 15.000.000
4	Harapan Satu	LP Prawita	Kota Tasikmalaya – Jawa Barat	Bahasa Inggris	Rp. 10.000.000
5	Harapan Dua	LKP ELTI Gramedia	Kota Yogyakarta – D.I Yogyakarta	Bahasa Inggris	Rp. 7.500.000
6	Harapan Tiga	LKP Selective English Course	Kota Pangkalpinang – Kepulauan Bangka Belitung	Bahasa Inggris	Rp. 5.000.000

5) Evaluasi diri Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pada tahun 2018, kinerjanya ditargetkan sebanyak 185 lembaga, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 50 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 27,03%.

Realisasi yang belum memenuhi target tersebut dimungkinkan karena kegiatan yang awalnya direncanakan untuk persiapan LKP menuju akreditasi, bersinggungan dengan tugas dan fungsi pemetaan mutu oleh UPT BP-PP Paud dan Dikmas. Anggaran yang sedianya akan dimanfaatkan untuk kegiatan ini kemudian dialihkan ke kegiatan lain.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan menyusun panduan pelaksanaan evaluasi diri yang terintegrasi dengan pemetaan mutu yang dilakukan oleh UPT.

6) Penyelarasan Program Kursus dan Pelatihan dengan DUDI

Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 60 orang, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 60 orang, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi sesuai target dimungkinkan karena ketepatan pelaksanaan program sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat oleh kesepuluh organisasi mitra penyelenggara Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan untuk 10 jenis keterampilan lomba, yaitu 1) Tata Kecantikan Rambut, 2) Tata Rias Pengantin Tradisional, 3) Tata Rias Pengantin Modifikasi, 4) Tata Boga, 5) Tata Boga untuk Makanan Khusus, 6) Spa, 7) Otomotif, 8) Membatik, 9) Hantaran, dan 10) Merangkai Bunga.



*Gambar 10. Lomba Kompetensi Peserta Didik Bidang Tata Rias Pengantin*

Berikut ini adalah daftar pemenang lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tahun 2018:

Tabel 23. Pemenang Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA PESERTA DIDIK	KABUPATEN/ KOTA-PROVINSI	DANA PEMBINAAN
<b>I. LOMBA MERANGKAI BUNGA KIRIMAN FLORA NUSANTARA</b>				
1	Pertama	Willy	Kota Bandung – Jawa Barat	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Varick Simenon	Kota Surabaya – Jawa Timur	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Sahrul Anwar	Kota Bogor – Jawa Barat	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Ni Nyoman Yuni Juniati	Kota Denpasar – Bali	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Ajan Jaji	Kota Bogor – Jawa Barat	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Sawab	Kabupaten Temanggung– Jawa Tengah	Rp. 3.000.000
<b>II. LOMBA MAKANAN KHUSUS “DIET BAGI PENDERITA DIABETES”</b>				
1	Pertama	Risety Endriningsih	Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Faqih Nursyadid Risfand	Kota Bandung – Jawa Barat	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Dandi Prabowo	Kabupetan Sleman – D.I Yogyakarta	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Endri Kurniawan	Kota Bandar Lampung – Lampung	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Adawiah	Kabupaten Pandeglang – Banten	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Dewi Astuti	Kota Pangkal Pinang – Kepulauan Bangka Belitung	Rp. 3.000.000
<b>III. LOMBA KREASI HANTARAN IDUL FITRI, BUKU TAMU DAN SOUVENIR UNTUK PERNIKAHAN</b>				
1	Pertama	Afwani SS	Kota Medan – Sumatera Utara	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Solehah	Kota Cilegon – Banten	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Iin Suwardi	Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Cici	Kota Jakarta Timur – DKI Jakarta	Rp. 7.500.000

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA PESERTA DIDIK	KABUPATEN/ KOTA-PROVINSI	DANA PEMBINAAN
5	Harapan Dua	Sarinah	Kota Tarakan – Kalimantan Utara	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Reza Herdina Renaliastuty	Kota Samarinda – Kalimantan Timur	Rp. 3.000.000
<b>IV. LOMBA MEMBATIK CAP SELENDANG DENGAN PEWARNA RAMAH LINGKUNGAN “PESONA ALAM NUSANTARA”</b>				
1	Pertama	Ferry Sugeng Santoso	Kabupaten Pasuruhan – Jawa Timur	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Nurul Fadzillah	Kota Banda Aceh – Aceh	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Emilya Roesvitasari	Kota Bengkulu – Bengkulu	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Jasril	Kota Padang – Sumatera Barat	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Listiarini	Kabupaten Lampung Selatan – Lampung	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Aransta Fanny Lamberta	Kota Yogyakarta – DI Yogyakarta	Rp. 3.000.000
<b>V. LOMBA OTOMOTIF TEKNIK SEPEDA MOTOR LEVEL III KKNi</b>				
1	Pertama	Nopon Sastro	Kota Bengkulu – Bengkulu	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Moch. Yusuf Nurrokhim	Kabupaten Nganjuk – Jawa Timur	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Hasbul Imam	Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Teguh Saputera	Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Muhammad Baihaqi	Kabupaten Demak – Jawa Tengah	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Ade Candra	Kota Palembang – Sumatera Selatan	Rp. 3.000.000
<b>VI. LOMBA SOP DAN SOTO NUSANTARA DALAM SAJIAN INTERNASIONAL</b>				
1	Pertama	Yusriza	Kota Padang – Sumatera Barat	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Widian Ya Kobus	Kota Palembang – Sumatera Selatan	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Rafdian Putri	Kota Banda Aceh – Aceh	Rp. 10.000.000

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA PESERTA DIDIK	KABUPATEN/ KOTA-PROVINSI	DANA PEMBINAAN
4	Harapan Satu	Rekayana Saraswati	Kota Pekanbaru – Riau	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Rizky Indri Risyanti	Kota Depok – Jawa Barat	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Santi Rahayu	Kota Tanjung Pinang – Kepulauan Riau	Rp. 3.000.000
<b>VII. KATEGORI JENIS KETERAMPILAN TATA RIAS PENGANTIN MODIFIKASI DAN MODERN</b>				
1	Pertama	Rani Rodiyani	Kabupaten Pesawaran – Lampung	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Maya Sugiroh	Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	M. Rajif Ainur Rohman	Kabupaten Bojonegoro – Jawa Timur	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Agustina Evi Tyas Susanti	Kabupaten Karanganyar – Jawa Tengah	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Rachmadahniar Fitriadi	Kota Balikpapan – Kalimantan Timur	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Tarmizi Tohir	Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat	Rp. 3.000.000
<b>VIII. LOMBA BODY TREATMENT DAN SPA PEDICURE</b>				
1	Pertama	Septiana Dyah Ayu Wulandari	Kabupaten Bantul – D.I Yogyakarta	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Agatha Ratu Maheswara Dewayana	Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Cahya Faradiba Ramadhania	Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Eva Mustika	Kabupaten Pati – Jawa Tengah	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Andani Fitri Rahayu	Kabupaten Pati – Jawa Tengah	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Rustanti Wahyu Setyaningsih	Kota Samarinda – Kalimantan Timur	Rp. 3.000.000
<b>IX. LOMBA TATA RIAS PENGANTIN TRADISIONAL PAES DAN NON PAES</b>				
1	Pertama	Yulianingsih	Kabupaten Bantul – D.I Yogyakarta	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Wildan Abdul Majid	Kota Bandung – Jawa Barat	Rp. 12.500.000

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA PESERTA DIDIK	KABUPATEN/ KOTA-PROVINSI	DANA PEMBINAAN
3	Ketiga	Hanung Purwari Kusuma	Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Ima Widya Wardani	Kota Blitar – Jawa Timur	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Juman	Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Putri Wijayanti	Kota Samarinda – Kalimantan Timur	Rp. 3.000.000
<b>X. LOMBA TATA RIAS WAJAH PANGGUNG PENARI DAERAH</b>				
1	Pertama	Luh Putu Febriyanti	Kota Denpasar – Bali	Rp. 15.000.000
2	Kedua	Weni Hermaini	Kota Padang – Sumatera Barat	Rp. 12.500.000
3	Ketiga	Fajria Sri Wulandari	Kota Kediri – Jawa Timur	Rp. 10.000.000
4	Harapan Satu	Septika Tri Handayani	Kabupaten Pringsewu – Lampung	Rp. 7.500.000
5	Harapan Dua	Arma Dwipa Setya Dharma	Kota Yogyakarta – D.I Yogyakarta	Rp. 5.000.000
6	Harapan Tiga	Tutik Mardiyah	Kabupaten Jepara – Jawa Tengah	Rp. 3.000.000

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan seperti harga tiket pesawat yang tidak stabil.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi/undangan kegiatan lebih awal
- b. Meminta konfirmasi kehadiran serta harga tiket pesawat kepada peserta sebelum kegiatan dilaksanakan



Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%, dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2018 capaian kinerja dapat dipertahankan.

7) Pendayagunaan Data Dapodik Kursus dan Pelatihan

Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 200 Lembaga, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 366 Lembaga, dengan persentase capaian sebesar 183%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme mengundang para kepala seksi atau kepala bidang dinas pendidikan kabupaten/kota yang menangani kursus dan pelatihan terkait urgensi data dapodik dalam penyusunan rencana program di wilayah kerja masing-masing.

Meskipun telah mencapai bahkan melebihi target, dalam pelaksanaannya tetap ditemui kendala yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan sementara masih banyaknya pertanyaan peserta sebagai tindak lanjut dari sosialisasi program dan upaya mengatasi hambatan dan tersebut yaitu:

Mengoptimalkan fungsi Teknologi Informasi seperti Whatsapp group dalam berkomunikasi agar hal terkait pendayagunaan data dapat tersosialisasikan secara lebih luas.

8) Validasi Pengembangan Model Kursus dan Pelatihan

Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 29 Lembaga, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 20 Lembaga, dengan persentase capaian sebesar 68,97%.

Realisasi yang tidak mencapai target tersebut dimungkinkan karena ada 9 UPT PP-BP Paud dan Dikmas yang tidak melakukan pengembangan model di tahun 2018 ini.

Pada tahun 2018, Direktorat Pembinaan melakukan validasi pengembangan model kursus dan pelatihan yang dikembangkan di PP-BP Paud dan Dikmas sebanyak 43 judul model.. Berikut ini adalah judul model kursus dan pelatihan yang divalidasi di tahun 2018:

Tabel 24. Judul Model Yang Divalidasi di Tahun 2018

NO	INSTANSI	JUDUL MODEL	TAHAP	TIM PENGEMBANG
1	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Model Kursus Caregiver Perkotaan	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Drs. Dwi Sudarmanto Lilik Rahajoe Lestari, S.Pd, MM Krisna Kartika Pratiwi, S.Pd, M.Pd
2	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Model Pembelajaran Karakter Pada Program Pendidikan Kecakapan Kerja Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Santoso, S.Pd, M.Si. Moh. Masduqi, S.Pd Kartika Wulandari, SS
3	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sulawesi Selatan	Integrasi Kompetensi Kerja Dan Kewirausahaan Dalam Penyelenggaraan Kecakapan Hidup Tata Kecantikan Rambut Level II	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Ibrahim, S.Pd., M.Pd Muhammad Haedir, S.Sos., M.Pd Mukriani, S.Tp Syafuruddin, SE
4	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan Bagi Masyarakat Pesisir Dan Pulau Melalui Budidaya Lobster Keramba Jaring Dasar	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Drs. Hery Priono Liman, S.Pd., M.Pd Drs. Andi Muhammad Ihsan, S.Pd., M.Pd Irma Yulianti Adnan, SE
5	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sumatera Utara	Kursus Desain Grafis Berbasis Produk Kecakapan Hidup	<b>UJI COBA MODEL</b>	Pahala Rajagukguk. ST Marsinta sibagariang, S.Pd Johanes pasaribu, ST Farida hanum. M.Psi
6	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sumatera Utara	Pembinaan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti Melalui Krida Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	<b>UJI COBA MODEL</b>	Farida Hanum. M.Psi Johannes Pasaribu, ST Pahala Rajagukguk, ST Marsinta R. sibagariang, S.Pd
7	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sumatera Utara	Program Pendampingan Alumni Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	<b>UJI COBA MODEL</b>	Dra. Lisbet Simanjuntak, M.Pd Maruli Tua Barimbing S.Pd Maria peranganing. S.Pd Fajrianda, S.Pd. Fitria Evawani, ST
8	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Tengah	Model Pembelajaran Visa Pada Aplikasi Perkantoran	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Heru Priambodo, S.Pd., M.Kom Ir. M. Khozin Dwiyono Tatiek Dyah Wardani, SE. M.Kes

NO	INSTANSI	JUDUL MODEL	TAHAP	TIM PENGEMBANG
9	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Tengah	Model Kursus Desain Fashion terintegrasi Kursus Tata Busana Level III KKNi Melalui Massive Open Online Course (MOOC)	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Ana Kristiani, M.Pd Agus Wahyono, S.Sos Drs. Supriyadi
10	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sulawesi Selatan	Kursus Kewirausahaan Keluarga Melalui Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Muslihuddin, S.Pd Musdalifah, SS., M.Pd Ibrahim, S.Pd., M.Pd Mukriany, S.Tp
11	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Model Pembelajaran Menjahit Multi Level Menggunakan Metode Vitor Di Kabupaten Belu	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Frederik Dami, E.Sos Dra. H.Y. Mintarningsih, M.Pd Dra. Geterudis M.A. Djoka
12	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sumatera Utara	Pengelolaan Layanan Lembaga Kursus & Pelatihan Melalui Sim-K	<b>UJI COBA MODEL</b>	Dra. Lisbet Simanjuntak, M.Pd Fajriananda, S.Pd Fitria Evawani Tarigan, ST Maruli Tua Barimbing, S.Pd Maria Peranginangin, S.Pd
13	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Bengkulu	Model Pemberdayaan Lansia Melalui Pembelajaran Keterampilan Menganyam	<b>UJI COBA MODEL</b>	Elvi Triana R. M.Pd Ery Sumita, S.Pd Afriyanti, S.P., M.Pd
14	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Bengkulu	Model Pembelajaran Keterampilan Teknik Okulasi Karet Unggul.	<b>UJI COBA MODEL</b>	Drs. Zulkifli Marta, M.Pd Asrul Aji, S.Pd
15	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Tengah	Kursus Pendidik Paud Online Level IV KKNi (Guru Pendamping)	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Melati Indri Hapsari, M. Kes Birowo Dwi Chondro, S.Kom Dra. Retno Wihartati, M.Pd
16	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Model Kecakapan Kerja Bidang Pemandu Wisata	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Misadi Santoso Supriyanto Hermawan
17	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Gorontalo	Model Pembelajaran Kursus Keterampilan Tata Busana Level II (Asisten Pembuat Busana) Di Lkp Se Provinsi Gorontalo	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	

NO	INSTANSI	JUDUL MODEL	TAHAP	TIM PENGEMBANG
18	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Kalimantan Barat	Model Pembelajaran Ketrampilan Berbahasa Inggris Dengan Pendekatan Kontekstual Untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Drs. Rusmantara, M.Si. Drs. H Sukasdjo, M.Pd.
19	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Riau	Pengembangan Model Pengelolaan Lkp Menjahit Berbasis Wirausaha Di Kota Pekanbaru	<b>UJI COBA MODEL</b>	
20	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Barat	Model Pembelajaran Kursus Bidang Kehumasan Lanjutan Dalam Jaringan	<b>UJI COBA MODEL</b>	Mia Rachmiati, S.Sos, M.I.Kom Apip Hermana, M.Pd Drs. Haryono, M.Pd
21	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Barat	Model Penyelenggaraan Kursus Sekretaris Level 2 Dalam Jaringan	<b>UJI COBA MODEL</b>	Drs. Emul Mulyana, M.Pd Riany Ariesta, S.Pd Asep Saefudin, S.Si
22	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Model Pendidikan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Laut Berbasis Standar Nasional Indonesia	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Moh. Muzaqi Muhammad Noval Yuliati Kartikasari
23	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Model Pelatihan Ketrampilan kreatif Cenderamata Dari Bahan Limbah	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Budiono, M.Pd. Drs. Budi Setyono, M.Pd. Drs. Rudi Susilo Laksono
24	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Kalimantan Selatan	Model Desa Plasma Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Jamur Tiram Desa Kandangan Lama, Kec. Batakan, Kab. Tanah laut	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Abdurrahman, M.Pd Aniyoga Prawoto, M.Pd
25	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Kalimantan Selatan	Model Revitalisasi LKP pada Kemitraan Menuju Kemandirian	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Drs. Hermanto Ginting, M.Pd Purwanto, S.Pd
26	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Barat	Model Kursus Daring Teknisi Akuntansi	<b>UJI COBA MODEL</b>	Dr. Kuswara Yuyun nurfalalah, s.sos H. Dadang wahyudi, SE, M.MPd
27	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas)	Model Kursus Pekarya Kesehatan Dalam Jaringan	<b>UJI COBA MODEL</b>	Agus Ramdani, S.Sos., M.Pd Apipudin, M.Pd

NO	INSTANSI	JUDUL MODEL	TAHAP	TIM PENGEMBANG
	Provinsi Jawa Barat			
28	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Kalimantan Timur	Model Pengembangan Kemitraan Lembaga Kursus & Pelatihan Dalam Pengolahan Hasil Laut Di Kota Bontang	<b>UJI COBA MODEL</b>	Haniah, M.Pd. Noor Asminiwaty, S.Pd. Dra. Hartini, M.Pd.
29	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Tengah	Bisnis online dalam pendidikan Kewirausahaan - Pemasaran produk melalui media sosial	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Agus Wijatmoko, M.Pd Dra. Sri Lestari, M. Pd Dra. Nur Ratnawati
30	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Tengah	Pendidikan kewirausahaan bidang jasa berbasis digital	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Sanoto Hadi, M.Pd Drs. Sri Suyanto, M.Si Petra Dewi, SH, M.Pd Drs. Sujina
31	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Pembelajaran PKW Berbasis Potensi Desa	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Dwi Retno Kurniasari, S.P., M.Si Dra. Suratminingsih Udik Pudjianto, M.T
32	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Nusa Tenggara Barat	Model Kampung Nelayan Digital (Pengolahan Ikan)	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Baharudin, SS M. Irfan, S.Pd., MM. Nur Diya'ul Fajri, S.Pd
33	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi D.I Yogyakarta	Model Pembelajaran Problem Posing untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus dan Pelatihan dalam menghadapi Uji Kompetensi	<b>UJI COBA MODEL</b>	Drs. Hikmat Widayat Drs. Mahmudin, MM Bais Jajuli Sidiq, SP
34	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sulawesi Utara	Model Pembelajaran Keterampilan Kecantikan Terpadu dalam menyiapkan warga belajar usaha mandiri	<b>UJI COBA MODEL</b>	Dra. Yusie Conie Lempoy, M.Pd Dra. R.e Ralinda Debra Makikama, S.Pd
35	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Kalimantan Tengah	Sistem informasi dan administrasi program kurusus berbasis aplikasi dalam meningkatkan efektifitas pelayanan	<b>UJI COBA MODEL</b>	Drs. Elli Drs. Awet M. Tahan Dra. Rusne

NO	INSTANSI	JUDUL MODEL	TAHAP	TIM PENGEMBANG
36	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sumatera Sumatera Barat	Pengembangan Model Pembelajaran VILECON pada Komputer Aplikasi Perkantoran	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Drs. Rusdi Febriza Syofita Nur, M.Si Drs. Ruswan Afri Dewita, S.Pd
37	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sumatera Sumatera Barat	Pengembangan Model Pembelajaran Aneka Sulam Tradisional Minangkabau Sumatera Barat	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Drs. Mas Endri, M.Pd Guslindayati, S.Pd Drs. Ruswan Syafridanita
38	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Model Kursus di Era Digital	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Putu A. Widhiartha Mukharlis Junizal Erfan Agus Munif
39	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Timur	Model Pendampingan Wirausahawan Baru Keterampilan Kuliner di Kabupaten Trenggalek	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Ir. Danang Setiyono Yetty Widya Kusuma Santi, S.Sos, M.Si Ireng Dwi Widodo, MPd
40	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Papua	Aplikasi Pengelolaan Data Lkp (Lembaga Kursus Dan Pelatihan) Berbasis Web	<b>MODEL OPERASIONAL</b>	Agus Sulaiman Peni Siswati Nanang Kristanto
41	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sulawesi Tenggara	Model Pendampingan Pada Pendidikan Kecakapan Wirausaha bagi pengembang Usaha Menjahit di LKP Fatimah Kec. Unaaha Kab. Konawe	<b>UJI COBA MODEL</b>	H. La Sefu, S.Sos Dra. Aisyah Bakir Drs. Husen.B. Drs. Abdul Sakur
42	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Sulawesi Tenggara	Model Pembelajaran Perempuan Nelayan melalui Pendidikan Keterampilan Berbasis Olahan Ikan di Desa Sama Jaya Kec. Soropia Kab. Konawe	<b>UJI COBA MODEL</b>	Dra. Hj. Aisyah Bakir La Koante, ST. H. La Saefu, S.Sos Drs. Husen.B.
43	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Kalimantan Tengah	Pemanfaatan Aplikasi Digital Marketing Siladik.Com Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan	<b>UJI COBA MODEL</b>	Agnes Apolonia, S.Pd Des. Prihatin Junaidy, S.Ag

Dari 43 judul model yang divalidasi terdapat 19 judul yang dinyatakan layak disebarluaskan dengan perbaikan, dan baru dapat dibakukan setelah perbaikan diterima di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.



*Gambar 11. Validasi Model Kursus dan Pelatihan Tahun 2018*

Kinerja yang tidak memenuhi target tersebut dimungkinkan karena masih banyaknya diantara model yang dikembangkan itu tidak berkaitan dengan kursus dan pelatihan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi/undangan kegiatan lebih awal
- b. Perlu dipersiapkan tema untuk model yang akan dikembangkan di UPT (PP-BP Paud dan Dikmas) sehingga pengembangan model dapat lebih terarah.

Perealisasi IKK ini jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebanyak 3.633 lembaga, telah terealisasi sebanyak 2.228 atau 61,33%. Adapun yang menjadi hambatan belum terealisasinya target adalah adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa program harus ditunda pelaksanaannya. Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, adalah dilaksanakan terlebih dahulu program-program utama dengan mengundang dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai sasaran kegiatan dari wilayah yang memiliki binaan lembaga kursus dan pelatihan yang berjumlah besar.

## **6. Jumlah Jenis Kompetensi Lulusan terstandarisasi**

Berdasarkan nomenklatur tahun 2018, IKK ini tidak lagi menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dikarenakan hal tersebut terkait dengan

tugas dan fungsi institusi lain yaitu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD/PNF).

## **7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) Yang Memperoleh Bantuan Pembinaan**

Realisasi dari IKK ini adalah 390 Lembaga (89,04%) dari target renstra sebanyak 438 Lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 105 Lembaga maka realisasi IKK ini adalah sebesar 371,43%.

IKK Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina ini ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas untuk menyiapkan perangkat terkait pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik, antara lain membentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Tempat Uji Kompetensi (TUK), master penguji dan penguji uji kompetensi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009.

TUK adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. TUK ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) berdasarkan penilaian dan kelayakan. Pembentukan TUK bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lain serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.



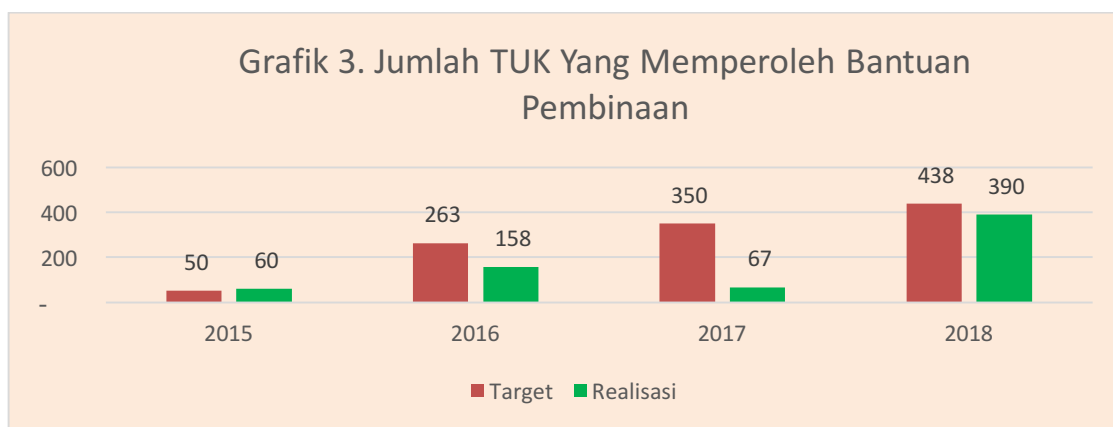
Untuk membantu kesiapan TUK menyelenggarakan uji kompetensi sehingga uji kompetensi bisa berjalan dengan optimal maka Direktorat memandang penting untuk memberikan bantuan penguatan kelembagaan TUK.

Capaian IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Penguatan melalui program pemberian Bantuan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi. Berikut ini adalah tingkat ketercapaian IKK Jumlah Tempat Uji Kompetensi yang dibina:

Tabel 25. Capaian IKK 7 Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan	67 Lembaga	67 Lembaga	100%	105 Lembaga	390 Lembaga	371,43%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan presentase capaian di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 271,43%, hal tersebut seiring dengan adanya peningkatan target sasaran sebanyak sebanyak 38 lembaga. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2019 sebesar 1.626 orang, sampai dengan tahun 2018 baru tercapai sebesar 675 lembaga atau 41,51%, berikut ini adalah grafik target dan realisasi IKK Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) Yang Memperoleh Bantuan Pembinaan tahun 2015 – 2018:



Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan target sasaran IKK Tempat Uji Kompetensi yang Memperoleh Bantuan Pembinaan di sepanjang periode Renstra

2015 – 2018. Kinerja tertinggi Direktorat ditunjukkan di tahun 2015 dimana realisasi mencapai 120% melebihi dari target yang ditetapkan dan kinerja terendah adalah di tahun 2017 dengan realisasi sebesar 19,14%.

Perealisasi IKK yang belum mencapai target ini disebabkan masih terbatasnya anggaran sehingga menyebabkan adanya perubahan kebijakan program di level Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran LSK dalam pembinaan TUK.

#### **8. Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi**

Realisasi dari IKK ini adalah 90.326 Orang (64,52%) dari target renstra sebanyak 140.000 Orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 15.000 Orang maka realisasi IKK ini adalah sebesar 602,17%.

Perealisasi yang melebihi target tersebut di atas, disebabkan karena adanya nominal biaya satuan uji kompetensi yang dibawah Rp.500.000,-, dan jumlah sasaran adalah peserta kursus yang mendapatkan bantuan uji kompetensi dan peserta kursus yang mendapatkan bantuan program PKK.

Sebagai tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri, maka pada tahun 2009 telah diselenggarakan uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh asosiasi/organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Sampai dengan tahun 2015 telah dibentuk 33 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).



*Gambar 12. Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Baby Sitter*

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji kompetensi tersebut dikarenakan

antarlain: (1) Keterbatasan kemampuan ekonomi peserta didik; (2) Biaya uji kompetensi oleh para penyelenggara kursus masih dianggap mahal, sehingga mereka tidak mau mengikutsertakan peserta didiknya pada uji kompetensi; (3) Belum tersedianya TUK di masing-masing kabupaten/kota sehingga apabila akan mengikuti uji kompetensi terpaksa harus menempuh perjalanan jauh yang berdampak pada waktu dan biaya yang mahal; (5) banyaknya jenis keterampilan yang diminati masyarakat namun belum terbentuk lembaga yang akan melaksanakan uji kompetensi.

Atas dasar permasalahan tersebut, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menganggap perlu mengambil kebijakan untuk memberikan fasilitas terhadap penyelenggaraan uji kompetensi terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang dan/atau tidak mampu.

Penerima manfaat dari dana bantuan ini adalah peserta didik kursus dan pelatihan yang termasuk dalam usia produktif, miskin, menganggur, dan berada pada kondisi putus sekolah, atau lulus tapi tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan.

Capaian IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu Peserta didik/ penguji pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi. Output ini didukung dengan program pemberian bantuan uji kompetensi yang pada tahun 2018 ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan sebanyak 15.000 orang yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

Dalam upaya pencapaian target output tersebut, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menerapkan strategi:

1. Pemberian bantuan uji kompetensi
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Bidang Kurikulum
3. Pendampingan uji kompetensi

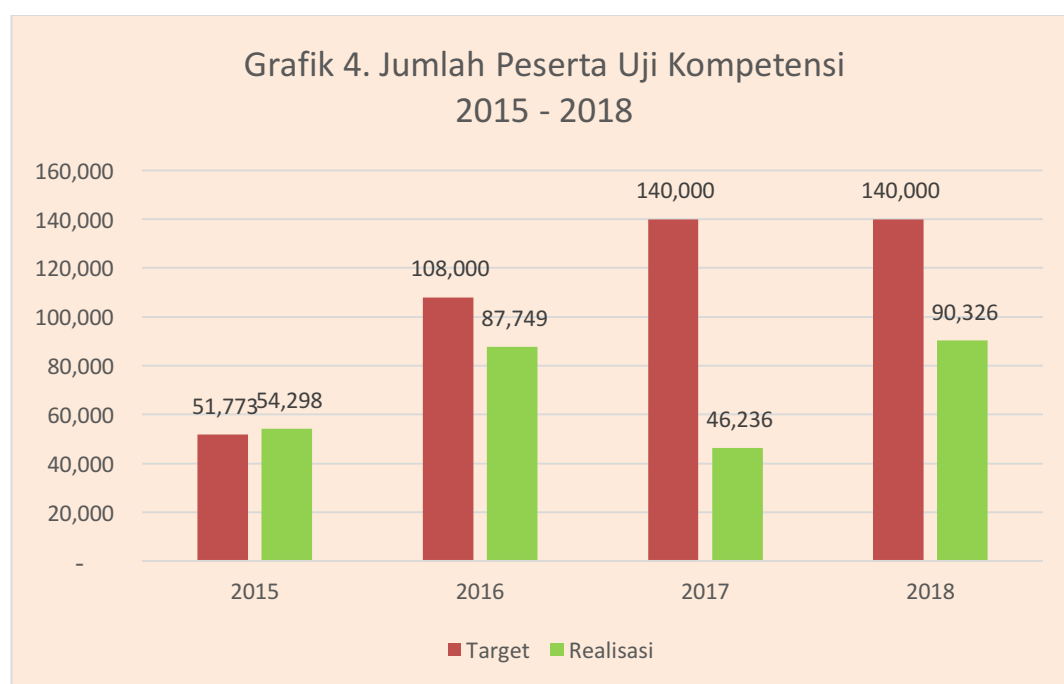
Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi:

Tabel 26. Capaian IKK 8 Tahun 2017 – 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	Peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	45.066 Orang	46.236 Orang	102,60%	15.000 Orang	90.326 Orang	602,17 %

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa output peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi telah melampaui target yang ditetapkan.. Jika dibandingkan antara target dan capaian di tahun 2017 dan tahun 2018, terjadi peningkatan sebesar 499,57%. Hal tersebut dikarenakan realisasi di tahun 2018 adalah jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan uji kompetensi ditambah dengan peserta didik yang mendapatkan bantuan program PKK. Di samping itu besarnya angka realisasi yang melebihi dari target dimungkinkan karena terdapat beberapa jenis keterampilan yang biaya uji kompetensinya lebih rendah dari satuan biaya bantuan uji kompetensi yang dialokasikan sehingga dana dapat dioptimalkan untuk menambah jumlah peserta uji kompetensi.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 579.773 orang, telah terealisasi sebanyak 278.609 orang atau sebesar 48,05%. Berikut grafik perealisasi IKK 8 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:



Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan target sasaran IKK Jumlah Peserta Uji Kompetensi di sepanjang periode Renstra 2015 – 2018. Kinerja terbaik Direktorat ditunjukkan di tahun 2015 dimana realisasi mencapai 104,88% melebihi dari target yang ditetapkan dan kinerja terendah adalah di tahun 2017 dengan realisasi sebesar 33,03%.

Perealisasi IKK yang belum mencapai target ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memaksimalkan peran LSK dan TUK dalam pelaksanaan uji kompetensi mandiri.

#### 9. Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis

Realisasi dari IKK ini adalah 382 lembaga (37,38%), kurang dari target renstra sebanyak 1.022 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 380 lembaga maka realisasi IKK ini sebesar 100,53%.

Ketercapaian realisasi target tersebut di atas, disebabkan karena proses realisasi dilakukan dengan mekanisme bimbingan teknis, pada pelaksanaannya dilakukan efisiensi anggaran sehingga dapat mengundang lebih banyak sasaran.

IKK “Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis” ditetapkan sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Berikut ini adalah tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK “ Jumlah lembaga penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis” :

Tabel 27. Capaian Kinerja IKK 9 Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan	-	-	-	240 Lembaga	234 Lembaga	97,50%
	Peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	-	-	-	140 Lembaga	148 Lembaga	105,71%

	Angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja	480 Lembaga	447 Lembaga	93,13%	-	-	-
	Layanan Internal (Overhead)	32 Lembaga	27 Lembaga	84,38%	-	-	-

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa ketercapaian IKK ini didukung oleh dua output yaitu:

- a. Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan
- b. Peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi

**a. Output Lembaga Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Penguatan**

Pada tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 240 lembaga, setelah diukur pencapaiannya target kinerja terealisasi sebanyak 234 lembaga, dengan persentase capaian sebesar 97,50%.

Ketidaktercapaian target kinerja tersebut disebabkan karena beberapa peserta membatalkan/tidak hadir karena berbagai alasan.

Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. peserta mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kegiatan
- b. peserta sakit
- c. peserta memiliki kesibukan lain

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pemberitahuan/undangan kegiatan lebih awal
- b. meminta konfirmasi kedatangan sebelum kegiatan dilaksanakan
- c. mencari pengganti untuk peserta yang sudah mengkonfirmasi ketidakhadiran

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%, dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 93,33%, maka pada tahun 2018 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 6,67%, hal ini disebabkan oleh konfirmasi ketidakhadiran peserta diberikan pada saat mendekati pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak sempat melakukan penggantian peserta.

Capaian output ini didukung oleh satu program kegiatan yaitu Bimbingan Teknis manajemen lembaga kursus dan pelatihan

Dalam upaya mewujudkan LKP yang bermutu dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan perlu mendorong LKP untuk dapat segera memenuhi standar nasional pendidikan melalui upaya pembinaan melalui Bimbingan Teknis manajemen pengelolaan LKP.

Melalui kegiatan bimbingan teknis manajemen pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan ini, diharapkan para pengelola LKP dapat terinspirasi dan tergugah untuk meningkatkan kapasitas layanan dan mutu lembaganya dalam menyelenggarakan program-program kursus dan pelatihannya sehingga lembaganya dapat terus berkembang dan memiliki daya saing baik nasional maupun internasional serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan DUDI.

***b. Output Peserta Didik/ Penguji/ Pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi***

Capaian output ini didukung oleh dua kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi dan Harmonisasi Uji Kompetensi.

Pada tahun 2018 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan sebanyak 140 lembaga mendapatkan bimbingan teknis LSK dan TUK.

Realisasi IKK hingga akhir Desember 2018 untuk output Peserta Didik/ Penguji/ Pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi adalah sebanyak 148 lembaga (105,71%) sehingga melebihi dari target yang ditetapkan. Sementara untuk kegiatan Harmonisasi Uji Kompetensi tidak dilaksanakan di tahun 2019 ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran dengan alasan masih diperlukannya penelaahan untuk kegiatan tersebut.

Perealisasi IKK ini dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 4.088 orang, telah terealisasi sebanyak 1.009 orang atau sebesar 24,68%. Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah adanya efisiensi (pemblokiran) anggaran sehingga menyebabkan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan program.. Sebagai

upaya mengatasi hambatan tersebut anggaran pengalihan anggaran pada kegiatan lain.

#### **10. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang Divalidasi**

Realisasi dari IKK ini adalah 4.026 lembaga (75,99%), masih kurang dari target renstra sebanyak 5.298 lembaga. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebesar 2.280 lembaga maka realisasi IKK ini sebesar 176,58%.

Dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola system pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengembangkan dan melaksanakan system informasi pendidikan nasional yang memuat basis data pendidikan yang bermasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan basis data pendidikan yang relasional sehingga mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data, perlu menetapkan data pokok pendidikan.

DAPODIK adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Atas dasar pengelolaan data pokok pendidikan melalui pendataan DAPODIK maka Kegiatan verifikasi dan validasi data LKP terintegrasi dengan data pokok pendidikan perlu dilakukan pada tahun 2019, dikarenakan masih banyak lembaga kursus dan pelatihan yang belum terdata pada data pokok pendidikan yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) adalah unsur pendukung tugas Kementerian di bidang data dan statistic pendidikan dan kebudayaan

Capaian IKK ini didukung oleh satu output yaitu Lembaga Kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan dan didukung oleh satu kegiatan Verifikasi dan Validasi data LKP terintegrasi dengan data DAPODIK pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan Verifikasi dan Validasi data LKP dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara. Peserta kegiatan ini adalah para kepala seksi atau kepala bidang yang menangani kursus dan menangani pendataan dapodik lembaga kursus dan pelatihan di dinas pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera



Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini bertujuan untuk mendongkrak data lembaga kursus dan pelatihan yang ada di aplikasi dapodik paud dan dikmas. Hasil dari kegiatan ini adalah terverifikasinya 4.026 data lembaga kursus dan pelatihan di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung pada aplikasi DAPODIK Paud dan Dikmas. Berikut ini data capaian IKK Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Yang Divalidasi pada tahun 2017-2018:

Tabel 28. Capaian IKK 10 Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	Lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan	2.000 Lembaga	13.101 Lembaga	655,05%	2.280 Lembaga	4.026 Lembaga	176,58%

Data di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara target dan realisasi di tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan realisasi sebesar 478,47%.. Sementara untuk target terjadi peningkatan sebesar 280 lembaga di tahun 2018.. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 22.989 lembaga, telah terealisasi sebanyak 18.226 lembaga atau sebesar 79,28%. Berikut grafik perealisasi IKK 10 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:



Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan target sasaran IKK Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang divalidasi di sepanjang periode Renstra 2015 – 2018. Kinerja terbaik Direktorat ditunjukkan di tahun 2017 dimana realisasi mencapai 252,23% melebihi dari target yang ditetapkan dan kinerja terendah adalah di tahun 2015 dengan realisasi sebesar 3%.

Perealisasi yang belum mencapai target di tahun 2018, dimungkinkan karena:

- Masih rendahnya anggaran untuk melakukan validasi ini sehingga masih belum menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.
- Masih kurangnya pemahaman teknis para pimpinan di daerah sehingga belum terjadi transfer pengetahuan yang baik dengan para operator di dinas pendidikan kabupaten/kota

Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka dilakukan hal sebagai berikut :

- Teknis kegiatan didesain lebih praktis dan aplikatif sehingga para pimpinan di daerah dapat melakukan transfer pengetahuan secara lebih baik pada para operator dipodik di wilayah kerja masing-masing dan dapat membuat kebijakan di lapangan agar proses pembaharuan data dapat berjalan lebih cepat.
- Untuk mengoptimalkan kegiatan ini maka dioptimalkan pelaksanaan pada satu provinsi dulu.

#### **11. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Siap Diakreditasi)**

Sejak tahun 2017, IKK ini tidak lagi menjadi tupoksi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, melainkan tupoksi UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas melalui program Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas. Dalam hal ini, anggaran dan pelaksanaan kegiatan berada di UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas.

#### **12. Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan mengikuti uji kompetensi.**

Realisasi dari IKK ini adalah 124 orang (6,37%), masih kurang dari target renstra sebanyak 1.946 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 100 orang maka realisasi IKK ini sebesar 124%.

Ketercapaian realisasi IKK tersebut melebihi target yang ditetapkan, dimungkinkan karena terdapat beberapa jenis keterampilan yang biaya pelatihannya disesuaikan dengan jenis keterampilannya

IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

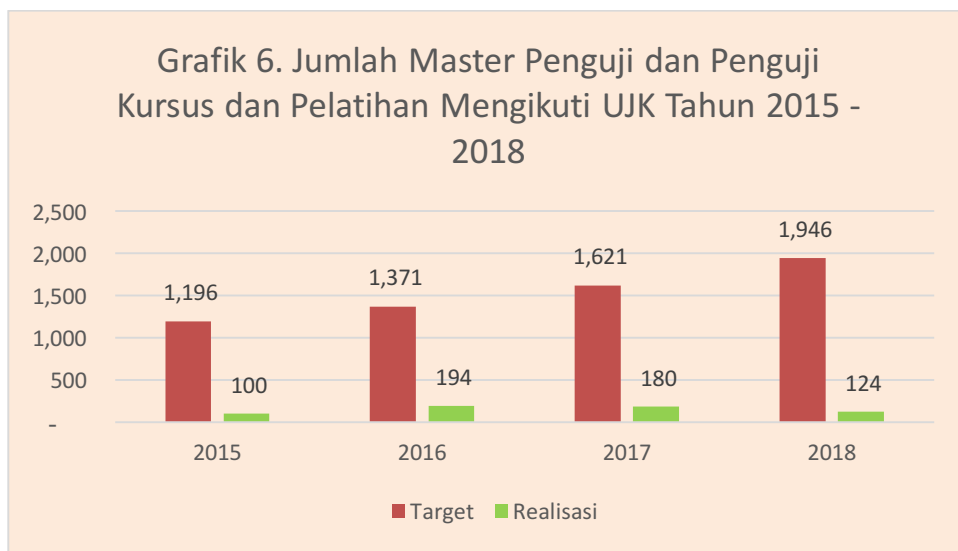
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Untuk itu ada 4 perangkat yang harus disiapkan yaitu LSK, TUK, master penguji dan penguji. Dari uraian di atas jelas bahwa peran master penguji dan penguji uji kompetensi adalah seorang ahli yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi master penguji kursus dan pelatihan. Master penguji ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sedangkan penguji adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji pada satu jenis keterampilan. Ketercapaian IKK ini dilihat melalui satu output yaitu peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi. Berikut ini tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur capaian IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi:

Tabel 29. Capaian IKK 12 Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti	Peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan	140 Orang	180 Orang	128,57%	100 Orang	124 Orang	124%

uji kompetensi	kompetensi						
----------------	------------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa di tahun 2018 capaian output peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi telah melampaui target sebesar 24%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target dan realisasi di tahun 2017, maka mengalami penurunan sebesar 4,57%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebesar 8.437 orang maka hingga tahun 2018 ini telah tercapai sebesar 598 orang (7,09%). Berikut grafik perealisasiannya IKK 12 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:



Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan target sasaran IKK Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi di sepanjang periode Renstra 2015 – 2018. Kinerja terbaik Direktorat ditunjukkan di tahun 2016 dimana realisasi mencapai 14,15% melebihi dari target yang ditetapkan dan kinerja terendahnya adalah di tahun 2018 dengan realisasi sebesar 6,37%.

Perealisasiannya yang belum mencapai target di tahun 2018, dimungkinkan karena:

- Masih rendahnya anggaran untuk mencapai sasaran ini sehingga masih belum menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka dilakukan hal sebagai berikut :

- Dilakukan penentuan lokasi kegiatan yang didekatkan dengan daerah asal calon master penguji maupun calon penguji uji kompetensi terbanyak, sehingga

secara tidak langsung anggaran perjalanan dinas dapat diefisienkan sementara calon master penguji maupun calon penguji uji kompetensi bertambah secara kuantitas.

### **13. Peserta Didik Kursus dan Pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI)**

Realisasi dari IKK ini adalah 1.000 orang (2,50%), masih kurang dari target renstra sebanyak 40.000 orang. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 1.000 orang maka realisasi IKK ini sebesar 100%.

Ketercapaian realisasi di atas, disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Perkembangan kebutuhan tenaga kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) belum dapat sepenuhnya disediakan oleh dunia pendidikan. Banyak lulusan dari lembaga pendidikan formal/non formal belum memiliki kompetensi yang diinginkan oleh DUDI. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk menjawab permasalahan di atas dikembangkan program magang peserta didik di DUDI sebagai program terobosan dalam pelayanan kursus dan pelatihan. Program magang sesungguhnya merupakan strategi pendidikan yang sudah lama diterapkan dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Akan tetapi dalam implementasinya masih jarang dilakukan terutama magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Program magang ini selaras dengan konsep *link and match* yang mempertemukan antara kebutuhan DUDI dengan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan program Magang Peserta Didik Kursus dan Pelatihan. Program ini dapat membangun kemitraan antara DUDI dengan lembaga kursus dan pelatihan. Program magang adalah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan belajar sambil bekerja secara langsung (*learning by doing*) yang dilaksanakan secara terpadu antara proses pembelajaran di LKP dengan praktik bekerja secara langsung dibawah bimbingan mentor di perusahaan sebagai upaya memenuhi standar di perusahaan.

Peserta magang adalah peserta didik dari warga masyarakat yang memiliki jenis keterampilan tertentu namun belum bekerja atau peserta didik regular pada LKP yang ingin mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan kompetensinya melalui magang di perusahaan/industry. Penyelenggara program magang adalah LKP atau satuan pendidikan lain yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program magang dan memiliki mitra kerja (DUDI) yang sesuai. Proses magang dilaksanakan antara 3 sampai 6 bulan di perusahaan industri, yang didahului dengan pendalaman materi serta pembekalan mental untuk persiapan memasuki dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan. Sasaran IKK ini adalah warga masyarakat yang sudah memiliki keterampilan terkait atau ingin meningkatkan kompetensinya agar dapat menaikkan jenjang karirnya.

Capaian IKK ini didukung oleh satu output yaitu Peserta didik/pengelola/penguji kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi. Realisasi output ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan magang peserta didik. Berikut tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur capaian IKK Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan mengikut magang pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI):

Tabel 30. Capaian IKK 13 Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan mengikut magang pada dunia usaha dan dunia industry	Peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	1.000 Orang	1.000 Orang	100%	1.000 Orang	1.000 Orang	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa di tahun 2018 capaian output peserta didik/ penguji/ pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi telah mencapai target sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target dan realisasi di tahun 2017 capaian kinerjanya sama yaitu sebesar 1.000 orang (100%). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebesar

98.303 orang maka hingga tahun 2018 ini telah tercapai sebesar 3.030 orang (3,08%). Berikut grafik perealisasiannya IKK 13 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:



Grafik di atas menunjukkan bahwa tidak ada penetapan target sasaran untuk IKK ini di tahun 2015 dan mulai tahun 2016 terjadi peningkatan target sasaran IKK Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI). Kinerja terbaik Direktorat ditunjukkan di tahun 2016 dimana realisasi mencapai 3,96% dari target yang ditetapkan dan kinerja terendahnya adalah di tahun 2018 dengan realisasi sebesar 2,50%. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya target sasaran renstra.

Perealisasi yang belum mencapai target di tahun 2018, dimungkinkan karena:

Anggaran untuk manajemen program ini dibatasi, sehingga tidak cukup anggaran untuk melakukan visitasi ke lembaga kursus dan DUDI tempat magang, padahal tahap ini sangat penting dilakukan untuk memastikan LKP penyelenggara dan tempat magang merupakan tempat yang baik dan layak bagi peserta magang. Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Persyaratan bagi LKP yang sudah terakreditasi
- b. Program dapat diakses secara online, sehingga pengiriman proposal dan proses penilaiannya dilakukan secara online pula

- c. Orientasi teknis hanya diberikan kepada lembaga yang belum pernah menyelenggarakan program magang sebelumnya

#### 14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Realisasi dari IKK ini adalah 3 Dokumen (150%), melebihi dari target renstra sebanyak 2 Dokumen. Sedangkan jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 6 Dokumen orang maka realisasi IKK ini sebesar 100%.

Ketercapaian realisasi di atas, disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan rencana yang telah disusun sebelumnya.

IKK “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana” ini ditetapkan dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan direktorat.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh satu output, yaitu Layanan manajemen eselon 1. Berikut ini tingkat ketercapaian output yang digunakan untuk mengukur IKK Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana:

Tabel 31. Capaian IKK 14 Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Layanan manajemen eselon 1	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa output ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 100%.

Realisasi output ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kursus dan pelatihan diperlukan adanya penyusunan rencana kegiatan maupun anggaran. Perencanaan ini merupakan kegiatan yang paling mendasar, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dalam penggunaan sumber daya. Hasil kegiatan ini adalah RKA-KL, Program Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan Direktorat.



Perencanaan program dan anggaran ini dilaksanakan dalam beberapa kali penyusunan dan revisi, mengingat sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal dan Kementerian sering terjadi perubahan. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program ini adalah perubahan perencanaan yang waktunya sangat sempit sehingga menyulitkan untuk melakukan koordinasi dengan tim penyusun dari masing-masing subdit dan subbag tata usaha. Hal ini berakibat pada perencanaan yang kurang matang meskipun secara pelaksanaan nantinya bisa dilakukan.

Tahun 2018, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menetapkan target sebanyak 3 dokumen perencanaan. Hingga akhir Desember 2018, telah diselesaikan 3 dokumen program kerja tahun 2019 melalui kegiatan penyusunan program kerja 2019 dan koordinasi perencanaan pusat dan daerah tentang lembaga kursus dan pelatihan serta perumusan program tahun 2019 melalui kegiatan penyusunan dan penyesuaian RKAKL Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Berbagai kebijakan dan program kursus dan pelatihan senantiasa dilakukan evaluasi sebagai bahan acuan perbaikan pelaksanaan program-program selanjutnya.

Evaluasi pelaksanaan program kursus dan pelatihan dilakukan untuk memantau pelaksanaan program serta melakukan pendampingan kewirausahaan terhadap penyelenggara dan rintisan usaha program PKW serta untuk melihat apakah bantuan tersebut sudah tepat persyaratannya, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya, serta memastikan berjalannya proses pendampingan lembaga kepada peserta didik.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pada tengah dan akhir tahun disusun LAKIP Direktorat.

Hingga akhir tahun telah tersusun LAKIP Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2018..

b. Pengelolaan Data dan Informasi

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan berikut: i) Pelatihan pengelola data dan informasi lembaga kursus dan pelatihan, ii) Perumusan rencana strategis pengelolaan data dan informasi lembaga kursus dan pelatihan.

Hingga akhir semester pertama telah dilaksanakan 3 kegiatan pelatihan pengelola data dan informasi lembaga kursus dan pelatihan yang dilaksanakan di 3 wilayah yaitu Anyer (Banten), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Surabaya (Jawa Timur).

### **15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN**

Realisasi dari IKK ini adalah 14 Dokumen (100%) jika diukur dari target output berdasarkan RKA-KL sebanyak 14 Dokumen.

Ketercapaian realisasi di atas, disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan rencana yang telah disusun sebelumnya.

IKK Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN ini ditetapkan dalam rangka mendukung ke-14 IKK yang sudah ditetapkan diatas.

Ketercapaian IKK ini didukung oleh tiga output:

a. Layanan dukungan manajemen eselon 1;

Realisasi output ini didukung oleh pelaksanaan 3 kegiatan yaitu: Pengelolaan Keuangan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan rumah tangga dan pelayanan humas dan protokoler. Hingga akhir Desember Tahun 2018 telah dilaksanakan:

1. Pengelolaan Keuangan melalui kegiatan:

- Penyusunan atas Laporan Keuangan, CR BMN dan Barang Persediaan, secara umum kegiatan ini terkait dengan pelaporan penyerapan keuangan brdasaraka SP2D. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan keuangan berbasis akrual baik secara bruto maupun netto, audited maupun unaudited. Sepanjang tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan 2(dua) kali.
- Penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan digitalisasi data laporan, secara umum kegiatan ini merupakan hasil rekomendasi auditor dalam menyelesaikan berbagai temuan baik yang brsiat administratif maupun yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Tujuan kegiatan ini

diharapkan bisa meminimalisir bahkan menyelesaikan berbagai temuan oleh auditor. Sepanjang tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali.

- Evaluasi target penyerapan anggaran, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk membuat laporan penyerapan anggaran secara akurat. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 12 (duabelas) kali sepanjang tahun 2018.
- Reviu Pemetaan Resiko Pengelolaan Keuangan, secara umum kegiatan ini merupakan upaya dalam memetakan setiap pekerjaan berdasarkan risiko dalam pengelolaannya sehingga diperoleh pengelolaan dengan tingkat risiko rendah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat peta risiko secara jelas dan mampu dipahami oleh setiap pengelolanya, seperti penilaian proposal dan penyaluran bantuan pemerintah, pengadaan barang/jasa, dll.

## 2. Pengelolaan Kepegawaian melalui kegiatan:

- Reviu Standar Kompetensi Jabatan Penghitungan Beban Kerja dan Penyesuaian SKP, secara umum kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat kesesuaian jabatan dan beban kerjanya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mereviu kembali standar yang telah dibuat. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2018.
- Evaluasi/reviu program kerja Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Prosedur Operasional Standar (POS), kegiatan ini adalah yang rutin dilaksanakan yaitu mengevaluasi proker dan standar tahun sebelumnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi internal.
- Implementasi SIMPel dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan proses SIMPel kepada para PPK dan pejabat pengadaan di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan 1(satu) kali di tahun 2018.

- Penyusunan laporan kinerja pegawai Direktorat. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat laporan secara ringkas, cepat dan tepat terkait kinerja pegawai di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan 1(satu) kali di tahun 2018.
- Penyusunan rencana umum pengadaan 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat pemetaan pengadaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya berdasarkan DIPA. Penyusunan ini dilakukan oleh masing-masing PPK dan pejabat pengadaan.
- Peningkatan kapasitas dan kerjasama pegawai. Kegiatan ini merupakan bentuk pelatihan modern yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kapasitas dan kerjasama pegawai.
- Penyusunan Capaian Program Direktorat 2015 – 2018. Kegiatan ini ditujukan untuk membuat capaian program seperti Pendidikan Kecakapan Kerja baik yang regular maupun unggulan.
- Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pemanfaatan TIK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemanfaatan TIK oleh pegawai di Direktorat. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali di tahun 2018.

### 3. Pelayanan Rumah Tangga melalui kegiatan:

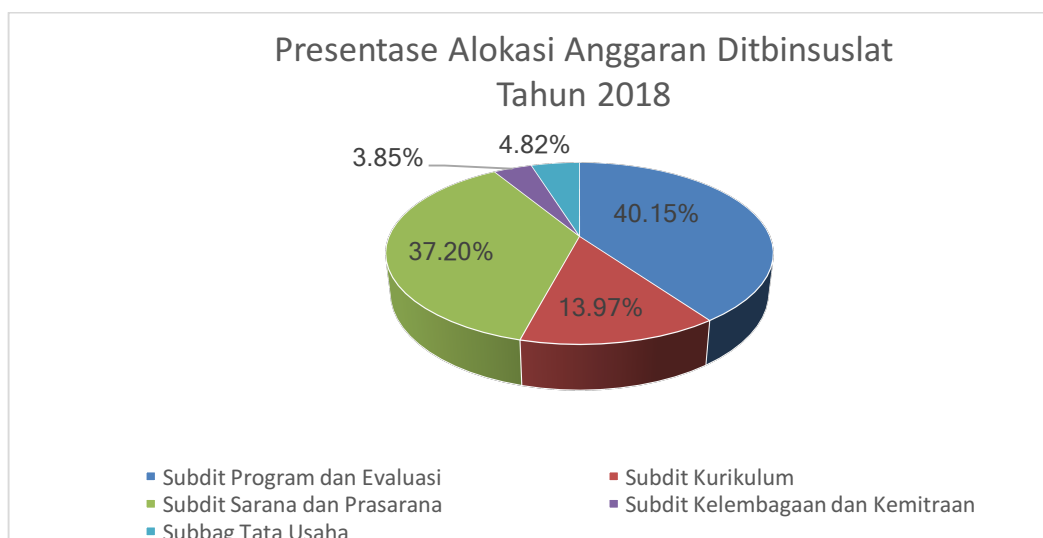
- Penghapusan Barang Milik Negara, merupakan upaya pengurangan aset yang tidak bisa dimanfaatkan lagi baik bergerak maupun tidak bergerak diantaranya PC, laptop, printer, meja dan kursi, mobil, sepeda motor.
- Pengelola Kearsipan, merupakan upaya memilah dan menata arsip yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola arsip sesuai jadwal retensi arsip.
- Fasilitasi Penyusunan Buku Data dan Informasi, merupakan kegiatan yang bertujuan membuat informasi detail dan terperinci sehingga pegawai mudah memahami informasi terkait kursus dan pelatihan. Buku berisi informasi LSK, TUK, jenis kursus, SKL, dll. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali setahun.

- Kodefikasi barang milik negara, merupakan kegiatan untuk mengupdate kondisi dan jumlah barang serta posisi barang tersebut baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
4. Pelayanan Humas dan Protokoler. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan direktorat melalui partisipasi pameran, majalan dan publikasi di media cetak. Kegiatan yang pernah diikuti antara lain partisipasi pameran RNPk 2018, Puncak acara hardiknas 2018, Publikasi melalui jawa pos, puncak hari aksara internasional.
- b. Layanan internal (overhead);
- Realisasi output ini didukung oleh pelaksanaan 3 kegiatan yaitu: perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, pembangunan/renovasi (gedung dan pembangunan). Hingga akhir Desember Tahun 2018 telah dilaksanakan:
1. Perangkat Pengolah Data, kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan peralatan yang mendukung kelancaran kerja seperti komputer portable laptop, kamera, LCD, Printer, dll.
  2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan peralatan yang mendukung kelancaran organisasi diantaranya perlengkapan kebugaran, dispenser, coffee maker dan penyedot debu.
  3. Pembangunan dan Renovasi Gedung, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki sarana kerja seperti eternit, partisi, keramik, tata cahaya, kelistrikan dan sarana lain untuk kenyamanan kerja.
- c. Layanan perkantoran;
- Realisasi output ini didukung oleh pelaksanaan 2 kegiatan yaitu: pembayaran gaji dan tunjangan dan operasional dan pemeliharaan kantor. Hingga akhir Desember 2018 ini telah terealisasi :
1. Gaji dan Tunjangan. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk 12 bulan layanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) baik yang fungsional maupun struktural.

2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor, memfasilitasi perjalanan dinas pimpinan dan staf.. Pada tahun 2018 telah terealisasi operasional pimpinan perkantoran; pengadaan perlengkapan kantor; pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor; langganan daya dan jasa; penyelenggaraan rapat-rapat serta jamuan ormit/instansi terkait; pemeliharaan dan operasional kendaraan bermotor/dinas; pengadaan pakaian satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubhakti, fasilitasi dukungan publikasi dan promosi, jasa petugas satpam pengemudi, petugas kebersihan dan pramubhakti; jasa pos dan giro; perbaikan ruang kerja;

## B. Realisasi Anggaran

Sasaran strategis terselenggaranya pendidikan dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global pada tahun 2018 anggarannya dialokasikan sebesar Rp. 348.358.450.000,- dari total anggaran sebesar Rp.366.014.392.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.361.039.319.725,- dengan presentasi capaian sebesar 98,64%. PAGU tersebut dilaksanakan untuk membiayai 4 (empat) program yang ada di subdit dan 1 (satu) subbag yang ada di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan guna mendukung 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).



*Gambar 13. Presentase Alokasi Anggaran Dit.Binsuslat*

Berikut adalah pengalokasian anggaran tahun 2018 pada empat program di subdit dan subbag yang ada di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan :

Tabel 32. Pembagian Alokasi Anggaran Dit.Binsuslat Tahun 2018

Nama Subdit/Subbag	PAGU
Subdit Program dan Evaluasi	146,971,055,000
Subdit Kurikulum	51,131,520,000
Subdit Sarana dan Prasarana	136,175,190,000
Subdit Kelembagaan dan Kemitraan	14,080,685,000
Subbag Tata Usaha	17,655,942,000
<b>TOTAL</b>	<b>366,014,392,000</b>

Sedangkan sebaran anggaran dari PAGU yang ditetapkan per akun belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Pembagian Alokasi Anggaran Per Akun Belanja 2018

Akun	PAGU
Belanja Pegawai	5,900,973,000
Belanja Barang	358,872,185,000
Belanja Modal	1,241,234,000
<b>TOTAL</b>	<b>366,014,392,000</b>



Gambar 14. Alokasi Anggaran Dit.Binsuslat Tahun 2018 Per Akun Belanja

Berikut realisasi kinerja keuangan berdasarkan jenis belanja di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi SIMKEU dan Biro Keuangan:

Tabel 34. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja

Akun	PAGU	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5,900,973,000	4,459,534,384	75.57%
Belanja Barang	358,872,185,000	355,374,551,341	99.03%
Belanja Modal	1,241,234,000	1,219,380,500	98.24%
<b>TOTAL</b>	<b>366,014,392,000</b>	<b>361,053,466,225</b>	<b>98.64%</b>

Dan berikut realisasi kinerja keuangan pada 13 IKK Utama dalam 5 (lima) output di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan:

Tabel 35. Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan IKK Output

NO	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi (SP2D)	%
1	[2015] Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan	366.014.392.000	361.053.466.225	98,64
1.1	[2015.001] Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) PN 51	158.439.100.000	157.417.804.424	99,36
1.2	[2015.002] Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) PN 51	146.053.155.000	144.366.057.467	98,84
1.3	[2015.003] Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan	22.772.185.000	21.484.325.175	94,34
1.4	[2015.004] Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan	8.084.890.000	7.467.070.871	92,36
1.5	[2015.005] Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	13.009.120.000	12.944.126.905	99,50
1.6	[2015.950] Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	7.161.708.000	6.434.633.682	89,85
1.7	[2015.951] Layanan Internal (Overhead)	671.234.000	663.363.650	98,83
1.8	[2015.994] Layanan Perkantoran	9.823.000.000	8.332.536.029	84,83
	<b>TOTAL</b>	<b>366.014.392.000</b>	<b>361.053.466.225</b>	<b>98,64</b>

Ketercapaian anggaran tersebut diatas yang didukung oleh 13 indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dialokasikan anggarannya sebesar Rp.158.439.100.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 157.417.804.424,- dengan presentasi capaian 98,64%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kerja yang terdiri dari bantuan pemerintah program PKK dan manajemen.. Bantuan pemerintah



PKK terserap 100%, sementara manajemen tidak terserap 100% disebabkan adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.

2. Jumlah angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 146.053.155.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 144.366.057.467,- dengan presentasi capaian 98,84%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan kewirausahaan/berwirausaha yang terdiri dari bantuan pemerintah program PKW dan manajemen.. Bantuan pemerintah PKW terserap 100%, sementara manajemen tidak terserap 100% disebabkan adanya efisiensi penggunaan belanja bahan dan perjalanan.
3. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan, dialokasikan anggarannya sebesar Rp.7.944.900.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.927.139.600,- dengan presentasi capaian 99,78%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 8.084.890.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.622.990.100,- dengan presentasi 94,29%. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 9.387.100.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 9.174.365.435,- dengan presentasi 97,73%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
6. Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi, tidak dialokasikan anggarannya dikarenakan sudah bukan menjadi Tusi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 3.007.200.000,-, telah terealisasi sebesar Rp. 2.413.555.400,- dengan presentasi 80,26%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan. Output ini tidak

terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.

8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 8.485.420.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.453.574.700,- dengan presentasi 99,62%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 2.330.910.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.328.306.300,- dengan presentasi 99,89%. IKK ini didukung oleh 2 (dua) output yaitu lembaga kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan dan peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 579.385.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 578.473.000,- dengan presentasi 99,84%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan mendapatkan penguatan. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siapa diakreditasi), tidak dialokasikan anggarannya dikarenakan sudah bukan menjadi Tusi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan menjadi Tusi UPT PP-BP PAUD dan Dikmas.
12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 592.090.000, telah terealisasi sebesar Rp. 591.038.600,- dengan presentasi 99,82%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya

efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.

13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI), dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 3.481.300.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.463.320.450,- dengan presentasi 99,48%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
14. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi, dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 3.622.658.000, telah terealisasi sebesar Rp.3.463.320.450,- dengan presentasi 99,48%. IKK ini didukung oleh 1 (satu) output yaitu layanan dukungan manajemen eselon 1. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.
15. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN, dialokasikan anggarannya sebesar Rp.14.033.284.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 12.266.482.663,- dengan presentasi 87,41%. IKK ini didukung oleh 3 (tiga) output yaitu layanan dukungan manajemen eselon 1, layanan internal (overhead), dan layanan perkantoran. Output ini tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penggunaan belanja bahan dan perjalanan dari manajemen kegiatan pendukungnya.

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

1. Efisiensi SDM terjadi pada pelaksanaan program prioritas nasional yaitu untuk Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha dan Pendidikan Kecakapan Kerja. Mekanisme Orientasi Teknis pada lembaga-lembaga kursus penerima dana bantuan dilaksanakan dengan menyebarkan tenaga-tenaga teknis ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau pada saat pelaksanaan ortek di kota-kota besar. Dengan demikian diharapkan seluruh penerima dana bantuan dapat menerima informasi teknis pelaksanaan program bantuan pemerintah.
2. Efisiensi Sarana dan Prasarana terjadi pada pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dalam berkomunikasi yang disediakan oleh Pusat Teknologi Komunikasi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan seperti contohnya *e-office* dalam pendisposisian surat, e-SKP dalam perencanaan dan pengukuran kinerja pegawai, social media seperti *whatsapp*, *Instagram*, *Facebook* maupun website [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) dalam mensosialisasikan program-program di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.. Disamping itu untuk menunjang kesehatan para pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga tersedia sarana untuk kebugaran, ibadah, toilet.

3. Efisiensi Anggaran, pada tahun 2018 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 10.587.600.000,- (Sepuluh Milyar Limaratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). . Penghematan anggaran tersebut berasal dari efisiensi belanja barang yang meliputi perjalanan dinas, honorarium belanja operasional dan non operasional lainnya.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, baik berdasarkan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan valuasi kegiatan dapat disimpulkan kinerja terhadap rencana kegiatan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja menamatkan pendidikan kecakapan kerja belum mencapai target renstra yang ditetapkan, namun telah melampaui target RKAKL
2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha belum mencapai target renstra yang ditetapkan namun telah melampaui target output berdasarkan RKAKL;
3. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan belum mencapai target renstra yang ditetapkan namun telah melampaui target output berdasarkan RKAKL;
4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan belum mencapai target renstra yang ditetapkan dan belum mencapai target output berdasarkan RKAKL;
5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan belum mencapai target renstra yang ditetapkan dan belum mencapai target output berdasarkan RKAKL;
6. Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi, tidak mencapai target renstra yang ditetapkan dan tidak mencapai target RKAKL karena sudah bukan menjadi Tusi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan dan tidak mencapai target renstra yang ditetapkan dan tidak mencapai target RKAKL karena sudah bukan menjadi Tusi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi, belum mencapai target renstra yang ditetapkan namun telah melampaui target output berdasarkan RKAKL;
9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis belum mencapai target renstra yang ditetapkan namun telah melampaui target output berdasarkan RKAKL;
10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi belum mencapai target renstra yang ditetapkan dan belum mencapai target output berdasarkan RKAKL;

11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap diakreditasi), tidak mencapai target renstra yang ditetapkan dan tidak mencapai target RKAKL karena sudah bukan menjadi Tusi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi belum mencapai target renstra yang ditetapkan namun telah melampaui target output berdasarkan RKAKL;
13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) belum mencapai target renstra yang ditetapkan namun telah mencapai target output berdasarkan RKAKL;
14. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sudah mencapai target renstra yang ditetapkan dan melampaui target output berdasarkan RKAKL;
15. Jumlah dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan BMN telah mencapai target yang ditetapkan baik di RKAKL maupun Renstra.

## **B. Rekomendasi**

Beberapa saran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis di atas:

1. Mengevaluasi kembali mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya pemanfaatan teknologi IT seperti aplikasi dalam mulai dari proses seleksi proposal dengan menggunakan aplikasi *E-Proposal*, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pada pencairan. Perlu dipertimbangkan juga penggunaan *E-Monitoring* untuk penggunaan dana bantuan pemerintah oleh lembaga pelaksana program sehingga pelaksanaan program dapat dipantau langsung. Mekanisme *top down* dapat dioptimalkan dengan penunjukkan langsung dari direktorat pembinaan kursus dan pelatihan bagi lembaga yang terakreditasi/berkinerja A dan B serta yang pada tahun sebelumnya memiliki catatan baik dan berhasil dalam melaksanakan program serupa. Sehingga dengan demikian diharapkan penyaluran dana bantuan dapat lebih cepat, akurat dan akuntabel.
2. Mendorong kesiapan organisasi profesi untuk menginisiasi terbentuknya LSK dan mendorong lembaga kursus dan pelatihan untuk melakukan pembentukan TUK khususnya untuk bidang-bidang keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

3. Mendorong percepatan penyusunan standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis kompetensi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang-bidang yang mendukung nawacita Presiden, potensi daerah dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
4. Optimalisasi fungsi dan peran masing-masing penanggungjawab program untuk dapat mempercepat realisasi program.
5. Peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pelatihan terutama hal-hal teknis terkait pekerjaan.